



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA NEGARA 2024





**KATA PENGANTAR  
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2024 ini merupakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2024 (sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024) sebagai bahan pembuatan program kerja tahun berikutnya dalam rangka usaha peningkatan keberhasilan dan penanggulangan hambatan-hambatan dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Negara kepada publik sesuai dalam ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan juga dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara yang telah membantu penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Tak lupa dengan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran maupun petunjuk yang bersifat konstruktif/membangun dari semua pihak, demi perbaikan di tahun mendatang.

Demikianlah semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semata demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Negara. Amin Yaa Rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Negara, 31 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Agama Negara,

**ABDULLAH, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198005312003121003



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar isi	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>Bab II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama</b>	<b>18</b>
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	22
- Keadaan Perkara Tingkat banding	22
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	22
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	22
<b>B. Penyelesaian Perkara</b>	<b>23</b>
- Jumlah sisa perkara yang diputus	24
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	27
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	27
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi	31
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	32
<b>C. Akreditasi Penjaminan Mutu</b>	<b>34</b>
- Posbakum	35
- Sidang keliling/pelayanan terpadu	36
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	40
<b>Bab III Sumber Daya Manusia</b>	<b>43</b>
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan	43
1. Mutasi	47
2. Promosi	50



3. Pensiun	52
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	55
<b>Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi</b>	
<b>Informasi</b>	58
A. Pengelolaan Keuangan	58
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	67
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	71
1. Implementasi E-Court	80
2. Implementasi SIPP	81
<b>Bab V Peningkatan Pelayanan Publik</b>	84
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	84
2. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	86
3. Inovasi Pelayanan Publik	87
4. Zona Integritas	106
<b>Bab VI Pengawasan</b>	120
A. Internal	122
B. Evaluasi	126
<b>Bab VII Penutup</b>	128
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi	129
<b>Lampiran</b>	
- Foto Kegiatan Pengadilan Agama Negara	



## DAFTAR ISI

PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA <ul style="list-style-type: none"><li>- Keadaan Perkara Tingkat Pertama</li><li>- Keadaan Perkara Tingkat Banding</li><li>- Keadaan Pertama Tingkat Kasasi</li><li>- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali</li></ul>
	B. PENYELESAIAN PERKARA <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus</li><li>- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu</li><li>- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali</li><li>- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi</li><li>- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi</li></ul>
	C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL <ul style="list-style-type: none"><li>- Posbakum</li><li>- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu</li><li>- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)</li></ul>
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"><li>A. Mutasi</li><li>B. Promosi</li><li>C. Pensiun</li><li>D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)</li></ul>
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI <ul style="list-style-type: none"><li>A. Pengelolaan Keuangan</li><li>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</li><li>C. Pengelolaan Teknologi Informasi</li></ul>
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK <ul style="list-style-type: none"><li>A. Pembangunan Zona Integritas</li><li>B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li><li>C. Inovasi Pelayanan Publik</li></ul>
BAB VI	PENGAWASAN <ul style="list-style-type: none"><li>A. Internal</li><li>B. Evaluasi</li></ul>
BAB VII	PENUTUP



# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel



- LAMPIRAN
- A. Kesimpulan
  - B. Rekomendasi
  - Foto-Foto Kegiatan



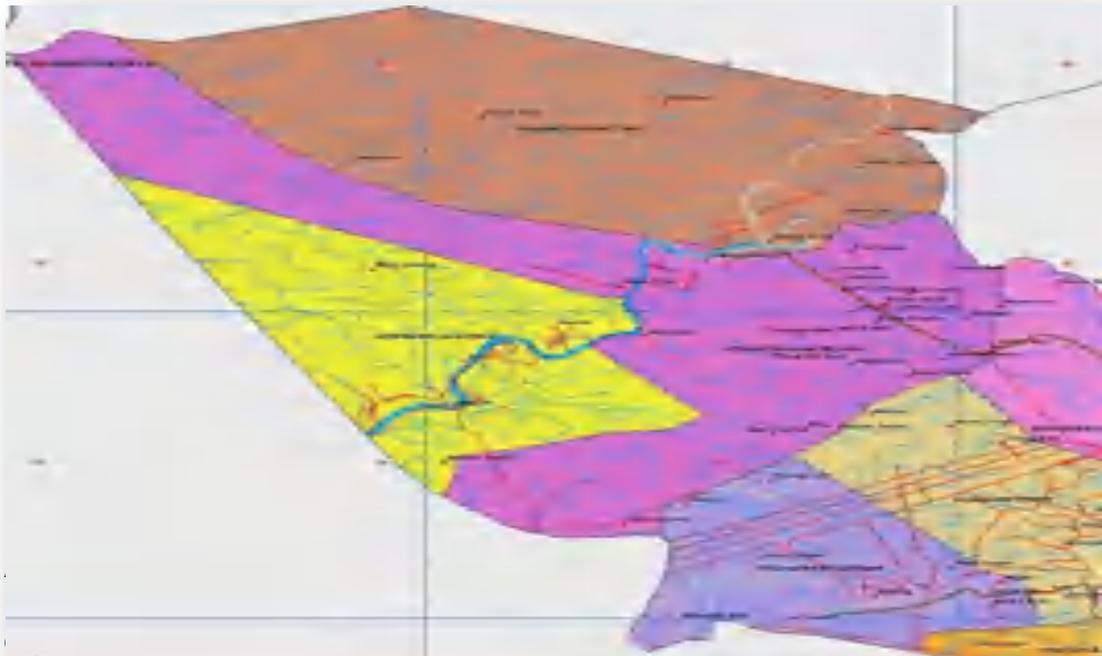
## BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu peradilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan sebagian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia disamping Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Negara meliputi sebagian wilayah dari seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Daha Selatan 322,82 km<sup>2</sup> (16 desa)
2. Kecamatan Daha Utara 268,11 km<sup>2</sup> (19 desa)
3. Kecamatan Daha Barat 149,62 km<sup>2</sup> (7 desa)

### Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Landasan kerja Pengadilan Agama Negara sebagai badan peradilan di tingkat pertama adalah :



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
10. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
13. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.



14. HIR dan RBg serta peraturan-peraturan dan Instruksi yang berkenaan dengan Peradilan Agama.

Perjalanan pembaruan MA-RI menuju "Peradilan Indonesia Yang Agung telah menjadi tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang notabene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan "Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia" kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019, merupakan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Reformasi Birokrasi gelombang kedua Badan Peradilan Indonesia dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, secara ideal badan peradilan yang agung adalah badan peradilan yang:
  1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;



2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Sebagai respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya :



1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MA RI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se- Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah "Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait".

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;



6. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna otomatisasi Pola Bindalmin;

7. "Justice for All" dengan paket kegiatan.

- a. Pelayanan Perkara Prodeo
- b. Pelayanan Sidang Keliling
- c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

8. Pengawasan

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung. Adapun misi Pengadilan Agama Negara adalah:

1. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
4. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;



6. Optimalisasi fungsi "One stop service" bagi masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan (SWOT) yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT), sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

#### 1. **Kekuatan(Strengths)**

- Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
- Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- Adanya reformasi tata kelola peradilan
- Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Adanya standar operasional prosedur (SOP)
- Adanya Dukungan sistem berbasis web/desktop
- Adanya Kode etik dan pedoman perilaku hakim
- Adanya Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai
- Adanya Job description dan SK penunjukan
- Adanya Renstra dan Program Tahunan
- Adanya kekompakan/komitmen manajemen



## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kurangnya jumlah SDM personil hakim, bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
- Terbatasnya anggaran perkara prodeo
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurangnya pelatihan dan Bimtek
- Luasnya wilayah hukum dan sulit terjangkau

## 3. Peluang (*Opportunities*)

- Optimalisasi sumber daya manusia (SDM)
- Kondisi masyarakat yang agamis
- Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
- Kerjasama dengan pihak kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan
- Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya panjar perkara
- Kerjasama dengan pihak radio Nagara Sehati 87,06 FM berkaitan dengan pemanggilan pihak yang gaib dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Negara
- Aplikasi berbasis web/desktop
- Kerjasama dengan pemerintah daerah beserta instansi terkait
- Aplikasi SIPP
- Aplikasi penunjang tupoksi
- Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda



#### 4. Ancaman (*Threats*)

- Meningkatnya pernikahan usia dini
- Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara/pernikahan sirri
- Sering terjadi pemadaman aliran listrik
- Para pihak sering tidak ada di tempat
- Aparat desa/kelurahan kadang tidak ada di tempat
- Koneksi internet yang tidak stabil
- Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Setelah melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap Pengadilan Agama Negara, maka hasil analisis SWOT yang telah dibuat dan diimplementasikan secara nyata di Pengadilan Agama Negara di tahun 2024 di antaranya adalah:

- ❖ Dengan adanya kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, Pengadilan Agama Negara dapat melakukan kerjasama resmi dengan pihak luar seperti PT. Pos Indonesia dan Bank BRI dalam hal pelayanan yang memudahkan masyarakat, serta kerjasama dengan pihak radio Nagara Sehati 87,06 FM berkaitan dengan pemanggilan pihak yang gaib dan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Negara
- ❖ Dengan adanya dukungan sistem berbasis web/desktop dan aplikasi penunjang tupoksi, Pengadilan Agama Negara dapat melaksanakan kinerja secara lebih efektif dan efisien dengan penggunaan aplikasi pendukung
- ❖ Dengan adanya aplikasi dan inovasi penunjang tupoksi, maka kekurangan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara, dapat



teratasi dengan penggunaan aplikasi penunjang kinerja (e-SUZIK, e-SK, dan e-Remun) secara optimal dan maksimal

- ❖ Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dapat mengatasi kelemahan dari luasnya wilayah yurisdiksi dan sulitnya jangkauan dengan melaksanakan layanan sidang keliling di daerah yang sulit dijangkau dan dengan biaya prodeo (bebas biaya).
- ❖ Untuk mengatasi kelemahan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara melakukan inovasi layanan Mobil Court untuk mengatasi kesulitan jarak dan waktu bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Agama Negara;

Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara untuk tahun 2020 telah dibuat pada awal Januari 2020, untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Renstra 2020-2024 yang bisa saja di review jika ada perubahan di tahun-tahun berikutnya.

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:**

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :  
Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali



- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis Pola Bindalmin, pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP (standar Operasional Prosedur) persidangan dan layanan, meningkatkan proses persidangan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melakukan diskusi hukum, optimalisasi terhadap pengawasan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan program pembinaan dan DDTK, dan rutin melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Negara.

## 2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**, dengan indikator kinerja:

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis



pola Bindalmin, melakukan pembinaan dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK), mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM, Penyempurnaan SOP dan mengikutsertakan Hakim untuk pelatihan Mediasi maupun ekonomi syariah, dan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan online melalui manual maupun online.

**3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan indikator kinerja :**

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara berbasis pola Bindalmin, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.

**4. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja:**



- Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melakukan pembinaan dan DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi keuangan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan penyempurnaan SOP.

Dari Renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di awal tahun 2024 yang telah terlaksana, mencakup :

1. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 Nomor KMA/001/SK/I/1993).
2. Di tahun 2024 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 368 perkara dari 368 perkara atau 100%
3. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung tahun 2024 yang dilaksanakan di 6 (enam) Desa, sebanyak 15 kali kegiatan dengan perkara yang diselesaikan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) perkara.
4. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 145 (sertaus empat puluh lima) perkara, dengan mekanisme 80 (delapan puluh)



perkara prodeo DIPA, 65 (enam puluh lima) perkara prodeo murni dengan mekanisme penerimaan perkara secara ecourt, dari target yang telah ditetapkan sebanyak 55 perkara.

ingkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan inovasi Mobil Court, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan/penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.

5. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Negara ([www.pa-negarakalsel.go.id](http://www.pa-negarakalsel.go.id)) dan media sosial Youtube, Facebook dan Instagram Pengadilan Agama Negara, yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Melalui website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupa jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran dan realisasi DIPA. Melalui website dan media sosial tersebut, Pengadilan Agama Negara juga menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.
6. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan pola rotasi, mutasi dan promosi pegawai, realisasi kenaikan pangkat, realisasi impassing dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian job description, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai



dalam SKP dan PKP, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan bezetting formasi dan DUK (Daftar Urut Kepangkatan), tertib absensi kepegawaian secara manual maupun online, proses perekrutan PPNPN dan pembuatan Surat Keputusan PPNPN serta Surat Perjanjian PPNPN, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kepaniteraan menjelang akhir tahun 2024.

7. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar (administrasi persuratan), terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
8. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2024 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
9. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Negara dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan, secara manual maupun online.
10. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Peradilan Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun dari instansi luar seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



(KemenpanRB) melalui pembinaan/pertemuan/desk evaluation, baik secara langsung maupun online, kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

11. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP, Dharmmayukti Karini, kegiatan sidang keliling, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



## BAB II

### A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Negara yang dijalankan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan



berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Negara sebagai organisasi, berfungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Yudikatif** sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
  - Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.
  - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
2. **Fungsi Administratif** sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Bidang Umum dan keuangan, Bidang



organisasi dan tata laksana, dan Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).

3. **Fungsi lainnya**, yakni memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta waarmeking akta keahlian warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
4. **Fungsi Lainnya** dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, seperti riset/penelitian, penyuluhan hukum, penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya di daerah hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan Agama Negara adalah dengan berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (BINDALMIN) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama, serta ketentuan-ketentuan lain dengan tetap memperhatikan azas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan.



Adapun keadaan perkara yang di terima di Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2024 yaitu sebanyak 368 perkara, yang terdiri dari 9 jenis perkara yaitu :

- Cerai Gugat : 171
- Cerai Talak : 27
- Istbat Nikah : 124
- Dispensasi Kawin : 7
- Asal Usul Anak : 30
- Pembatalan Perkawinan : 1
- Penetapan Ahli Waris : 5
- Perwalian : 2
- Wali Adhol : 1

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Negara tidak terdapat perkara Banding, Kasasi dan Perkara Peninjauan Kembali.



## B. PENYELESAIAN PERKARA

Menerima, memeriksa dan memutus perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, merupakan tugas pokok Pengadilan Agama Negara. Di tahun 2024, Pengadilan Agama Negara menerima beberapa perkara yang didominasi oleh perkara cerai gugat untuk kategori gugatan dan didominasi oleh perkara Isbat Nikah untuk kategori perkara permohonan.

Adapun perkara yang di terima di Pengadilan Agama Negara selama Tahun 2024 yaitu sebanyak 368 perkara, yang terdiri dari 9 jenis perkara yaitu :

NO	JENIS PERKARA	JU MLAH PERKARA
1	Cerai Gugat	171
2	Cerai Talak	27
3	Istbat Nikah	124
4	Dispensasi Kawin	7
5	Asal Usul Anak	30
6	Pembatalan Perkawinan	1
7	Penetapan Ahli Waris	5
8	Perwalian	2
9	Wali Adhol	1
Jumlah		368



## 1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Dari 368 perkara yang diterima di tahun 2024, Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2024, berhasil memutus semua perkara, yaitu 368 perkara dan tidak terdapat sisa perkara yang belum diputus.

### Jumlah sisa perkara yang diterima dan diputus Tahun 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH PERKARA YANG TELAH DIPUTUS
1	Cerai Gugat	0	171	171
2	Cerai Talak	0	27	27
3	Istbat Nikah	0	124	124
4	Dispensasi Kawin	0	7	7
5	Asal Usul Anak	0	30	30
6	Pembatalan Perkawinan	0	1	1
7	Penetapan Ahli Waris	0	5	5
8	Perwalian	0	2	2



9	Wali Adhol	0	1	1
Jumlah		0	368	368

Perkara yang diterima tahun 2024 yaitu 368 perkara dan tidak ada sisa perkara tahun 2024, perkara yang diterima tersebut telah diproses pada tahun 2024 sebanyak 368 perkara. Gambaran penyelesaian perkara tiap bulan dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	BULAN	GUGATAN								PERMOHONAN	JUMLAH PANITERA SIDANG
		GUGATAN				PERMOHONAN					
		SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	JANUARI	0	24	14	10	0	59	8	51		
2	PEBRUARI	10	20	12	18	51	2	52	1		
3	MARET	18	13	25	6	1	4	5	0		
4	APRIL	6	9	6	9	0	1	1	0		
5	MEI	9	25	19	15	0	7	3	4		
6	JUNI	15	9	18	6	4	4	6	2		
7	JULI	6	24	24	6	2	5	5	2		
8	AGUSTUS	6	14	15	5	2	8	6	4		
9	SEPTEMBER	5	9	9	5	4	8	9	3		
10	OKTOBER	5	24	11	18	3	8	6	5		
11	NOPEMBER	18	20	32	6	5	30	11	24		



12	DESEMBER	6	10	16	0	24	31	55	0	
JUMLAH										

Jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Negara termasuk kategori sedang, dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan Pengadilan Agama lainnya di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Negara mengadakan persidangan setiap hari senin sampai dengan rabu dan hari kamis dan jumat untuk agenda sidang keliling, dengan tujuan agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan.

Pada tahun anggaran 2024 persidangan dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) Majelis Hakim saja karena jumlah hakim terbatas, dengan susunan Majelis Hakim, yaitu Majelis (A).

**Jumlah Perkara Yang Diputus Tahun 2024 per-Kategori Jenis Perkara**

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur kan	Di Coret dari Register	Jumlah Lajur 6 s/d 11	Sisa Akhir bulan 5-s/d12	Banding	Kasasi	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Cerai Talak	0	27	27	0	25	1	0	1	0	27	0	0	0	0
2.	Cerai Gugat	0	171	171	9	159	0	2	1	0	171	0	0	0	0
3.	Penolakan Perkawinan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4.	Perwalian	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5.	Asal Usul Anak	0	30	30	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
6.	Isbat Nikah	0	124	124	3	80	20	19	2	0	124	0	0	0	0
7.	Dispensasi	0	7	7	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0	0



	Kawin														
8	Penetapan ahli waris	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
9	Wali Adhol		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Jumlah		0	368	368	12	306	25	21	4	0	368	0	0	0	0

## 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak perkara diterima. Perkara yang diputus tahun 2024 berjumlah 368 perkara, sedangkan penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perkara yang diputus kurang dari 3 bulan sebanyak 368 perkara, sedangkan perkara yang diputus antara 3 sampai 5 bulan berjumlah 0 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 0 perkara, yang artinya selama tahun 2024, semua perkara di Pengadilan Agama Negara telah diputus tepat waktu.

Untuk lebih selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN			
			DIPUTUS < 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	22	22	0	0	0
2	PEBRUARI	64	64	0	0	0
3	MARET	30	30	0	0	0



4	APRIL	7	7	0	0	0
5	MEI	22	22	0	0	0
6	JUNI	24	24	0	0	0
7	JULI	29	29	0	0	0
8	AGUSTUS	21	21	0	0	0
9	SEPTEMBER	18	18	0	0	0
10	OKTOBER	17	17	0	0	0
11	NOPEMBER	43	43	0	0	0
12	DESEMBER	71	71	0	0	0
JUMLAH		368	368	0	0	0

**3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.**

Perkara yang diputus tahun 2024 sebanyak 368 perkara terdiri dari 201 gugatan (contentius) dan 167 permohonan (voluntair). Diantara yang putus tahun 2024 tersebut di atas tidak ada pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

**Tabel Putusan yang diajukan Banding**

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang diajukan banding	0
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA	0
3	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat	0



	banding	
4	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding	0
5	Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

**Tabel Putusan yang diajukan Kasasi**

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0
2	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0
3	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0
4	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0
5	Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0

**Tabel Putusan yang diajukan Peninjauan kembali**

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0



2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
4	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
5	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
6	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
7	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
8	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
9	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
10	Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
11	Putusan pengadilan Tk.I yang menguatkan hukum	0



	tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	
12	Putusan pengadilan Tk.banding yang menguatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
13	Putusan pengadilan Tk.kasasi yang menguatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali	0
14	Putusan pengadilan Tk.I yang menguatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
15	Putusan pengadilan Tk.banding yang menguatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali	0
16	Putusan Tk.kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan tingkat Peninjauan Kembali	0
17	Putusan pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali	0
18	Putusan pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali	0

#### 4. Jumlah Perkara yang Berhasil dimediasi

Mediasi wajib dilakukan oleh Pengadilan Agama jika kedua pihak padaperkara gugatan hadir pada saat persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Mediasi dilakukan untuk memberikan jalan perdamaian bagi kedua pihak melalui Mediator, yang hasilnya bisa berhasil sebagian, berhasil dengan perdamaian,



berhasil dengan pencabutan perkara, tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2024 perkara gugatan yang dihadiri kedua pihak ada 34 perkara dan semuanya telah melalui proses mediasi, yang sampai dengan akhir bulan Desember 2024, 33 perkara yang berhasil mediasi, yaitu 27 perkara Cerai Gugat, 6 perkara Cerai Talak, sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 1 Cerai Gugat.

**Jumlah perkara yang mediasi Tahun 2024**

NO	JUMLAH PERKARA YANG DIHADIRI KEDUA PIHAK	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA MEDIASI BERHASIL	JUMLAH PERKARA MEDIASI TIDAK BERHASIL
1	34	34	34	1

**Perkara yang berhasil Dimediasi Tahun 2024**

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	NAMA MEDIATOR	HASIL MEDIASI
1	9/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
2	36/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
3	46/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
4	49/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.I.	Berhasil sebagian
5	50/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
6	61/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.I.	Berhasil sebagian
7	65/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian



8	69/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
9	75/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
10	86/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil dengan pencabutan
11	82/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.I.	Berhasil dengan pencabutan
12	90/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
13	94/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
14	97/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
15	101/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.I.	Berhasil sebagian
16	104/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	Abdul Hamid, S.H.I.	Berhasil sebagian
17	109/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil dengan pencabutan
18	108/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
19	129/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil dengan pencabutan
20	142/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
21	145/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.h.I.	Berhasil dengan pencabutan
22	148/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil sebagian
23	157/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil dengan pencabutan
24	149/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdul Hamid, S.H.	Berhasil dengan pencabutan
25	154/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
26	152/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	H.Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.	Berhasil dengan



				pencabutan
27	161/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil dengan pencabutan
28	171/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil dengan pencabutan
29	176/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
30	195/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Berhasil sebagian
31	198/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Lissa Dewi Andini, S.H.	Berhasil sebagian
32	199/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Tidak Berhasil
33	196/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Talak	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Berhasil sebagian
34	201/Pdt.G/2024/PA.Negr	Cerai Gugat	Abdullah, S.H.I.,M.H.	Berhasil sebagian

## 5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2024, Pengadilan Agama Negara belum ada yang mengajukan permohonan perkara anak yang berhasil melalui diversi.



### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan standar manajemen yang diberlakukan di badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal dengan mendapat nilai A (*Excellent*), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018, yang pada tahun 2019 telah dilakukan *surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019, dan pada tahun 2020 telah dilakukan *surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Pejaminan Mutu Badan Peradilan Agama MARI yang ada di PTA Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2020, serta tahun 2021 telah dilakukan *surveillance* ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Pejaminan Mutu Badan Peradilan Agama MARI yang ada di PTA Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021.

Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), program-program pelayanan masyarakat mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian



Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu melalui program Posbakum, Sidang Keliling/Terpadu dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

- 1. Posbakum**, Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau "excellent service" pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Pengadilan Agama Negara pada Anggaran Tahun 2024 mendapatkan alokasi Anggaran untuk Posbakum.

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah Pos Bantuan Hukum	1
2	Besaran PAGU (Rp)	30.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)	30.000.000
4	Jumlah Jam Layanan (Jam)	300
5	Jumlah Layanan (Orang)	300

**2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Letak geografis di 3 (tiga) wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara dikelilingi oleh rawa dan sungai yang luas dan cukup jauh serta



transportasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk mengagendakan sidang keliling.

Pada tahun 2024 anggaran yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang semuanya sudah terealisasi dengan 15 (lima belas) kali kegiatan dan berhasil menyelesaikan 62 (enam puluh dua) perkara.

Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan sidang keliling 15 (tujuh belas) kali kegiatan sesuai kebutuhan dalam DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Pra sidang Keliling**

No	Kegiatan	Tanggal	Ket
1	Pra sidang Keliling	12/01/2024	di Desa Bajayau Lama
2	Pra sidang Keliling	19/01/2024	di Desa Bajayau Lama
3	Pra sidang Keliling	15/02/2024	di Desa Tanjung Selor

- 1) Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 di Desa Baruh Jaya Lama, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Cerai Gugat.
- 2) Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Cerai Gugat.
- 3) Sidang Keliling yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 3 Februari di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.



- 4) Sidang Keliling yang keempat dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2024 di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Ceari Gugat.
- 5) Sidang Keliling yang kelima dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 6) Sidang Keliling yang keenam dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 7) Sidang Keliling yang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 di Desa Tanjung Selor, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 8) Sidang Keliling yang kedelapan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024 di Desa Tanjung Selor, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 9) Sidang Keliling yang kesembilan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 di Desa Baru, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 10) Sidang Keliling yang kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024 di Desa Baru, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.
- 11) Sidang Keliling yang kesebelas dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Cerai Gugat.



- 12) Sidang Keliling yang keduabelas dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024 di Desa Tanjung Selor, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perkara Isbat Nikah.

**Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2024**

No	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	38.800.000	0	7.200.000	7.200.000	31.600.000	4	Verifikasi data
2	Februari	38.800.000	7.200.000	6.080.000	13.280.000	17.520.000	5	48
3	Maret	38.800.000	13.280.000	17.720.000	31.000.000	7.800.000	6	9
4	April	38.800.000	26.400.000	9.600.000	36.000.000	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		38.800.000	31.000.000	7.800.000	38.800.000	0	15	57

Realisasi pencairan dana sidang keliling (sidkel) baru terlaksana pada tanggal 09 Februari 2024 seluruh kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2024 .

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1
2	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar	15



	Gedung Pengadilan	
3	Besaran PAGU	38.800.000
4	Jumlah Realisasi Anggaran	38.800.000
5	Jumlah Perkara	57 perkara

Pelayanan sidang terpadu, adalah pelayanan sidang untuk perkara istbat nikah, yang melibatkan instansi lain seperti Kantor Urusan Agama (Kemenag) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disukcapil), dimana setelah mendapatkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama, para pihak juga mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA dan Kartu Keluarga serta akta kelahiran dari Disdukcapil dalam satu waktu. Pengadilan Agama Negara pada tahun 2024 belum ada melaksanakan pelayanan sidang terpadu dengan melibatkan instansi lain.

### Pelayanan Sidang Terpadu Isbat Nikah

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu	0
2	Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu	0
3	Jumlah Perkara Isbat Nikah	0
4	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Dikabulkan	0
5	Jumlah Perkara Isbat Nikah yang Ditolak	0



6	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Suami	0
7	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk Isteri	0
8	Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan	0

### 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Negara mendapat alokasi dana untuk perkara prodeo dan pembebasan biaya perkara sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah terealisasi sebesar Rp30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 80 perkara prodeo DIPA, 65 perkara prodeo murni dengan mekanisme penerimaan perkara secara ecourt, sehingga jumlah perkara prodeo 145 perkara dari target yang telah ditetapkan sebanyak 55 perkara.

#### Pelaksanaan Prodeo Tahun 2024

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	30.250.000	0	0	0	30.250.000	2
2	Februari	30.250.000	0	4.055.000	4.055.000	26.195.000	48
3	Maret	30.250.000	4.055.000	8.460.000	12.515.000	17.735.000	9



4	April	30.250.000	12.515.000	6.035.000	18.550.000	11.700.000	0
5	Mei	30.250.000	18.550.000	1.350.000	19.900.000	10.350.000	3
6	Juni	30.250.000	199.900.000	2.250.000	22.150.000	8.100.000	5
7	Juli	30.250.000	22.150.000	1.350.000	23.500.000	6.750.000	3
8	Agustus	30.250.000	23.500.000	1.350.000	24.850.000	5.400.000	6
9	September	30.250.000	24.850.000	1.800.000	26.650.000	3.600.000	2
10	Oktober	30.250.000	26.650.000	1.500.000	28.150.000	2.100.000	2
11	November	30.250.000	28.150.000	0	28.150.000	2.100.000	15
12	Desember	30.250.000	28.150.000	0	28.150.000	2.100.000	50
<b>Jumlah</b>		30.250.000				0	145

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA/MSy dengan anggaran Pembebasan Biaya Perkara	1
2	Besaran PAGU	30.250.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	28.150.000
4	Jumlah Perkara	80



## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara terbagi dua, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi peradilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tupoksi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Negara memerlukan sumber daya manusia teknis yudisial yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Negara sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari 8 orang teknis yudisial dan 7 (tujuh) orang non teknis yudisial. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial:

No.	Nama	Jabatan
1	Abdullah, S.H.I., M.H.	Ketua
2	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Wakil Ketua
3	Lissa Dewi Andini, S.H.	Hakim
4	Winda Herliana, S.H.	Panitera
5	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
6	H. Masrani, S.H.	Panitera Muda Gugatan
7	Moh. Ramli, S.H.	Juru Sita
8	Iswadi Idris, A.Md.	Juru Sita Pengganti



**Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial:**

No.	Nama	Jabatan
1	Akhmad Muzakkir, S.H.I.	Sekretaris
2	Nadia Fauzana, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Silma Lathifah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
4	Dwi Ruli Handoko, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
5	Muhammad Raznan Muyassar Tsaqif, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
6	Yodha Ari Sulistya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
7	Nanda Jazirotus Soraya, A.Md.A.B.	Pengelola Penanganan Perkara

**Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan**

**Tenaga teknis Yudisial dan non Teknis Yudisial menurut Pangkat/**

**Gol. Ruang Tahun 2024:**

No	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang																Ket.		
		IV					III				II				I					
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d	
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
4	Panitera	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
6	Panitera Muda Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panitera Muda Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
8	Panitera Muda Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kosong
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kosong
10	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
11	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kosong
12	Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
13	Juru Sita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 orang
14	Analisis Perkara Peradilan	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 orang
15	Arsiparis Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kosong
16	Pengelola Penanganan Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 orang



## Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial

### menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024:

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	Ketua	-	1	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	1	-	-	1 orang
3	Hakim	-	-	1	-	-	1 orang
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang
5	Sekretaris	-	-	1	-	-	1 orang
6	Panitera Muda Hukum	-	-	1	-	-	1 orang
7	Panitera Muda Gugatan	-	-	1	-	-	1 orang
8	Panitera Muda Permohonan	-	-	-	-	-	kosong
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	kosong
10	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	-	-	1	-	-	1 orang
11	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	-	-	-	-	-	kosong
12	Juru Sita	-	-	1	-	-	1 orang
13	Juru Sita Pengganti	-	-	-	1	-	1 orang
14	Analisis Perkara Peradilan	-	-	4	-	-	4 orang
15	Arsiparis Pelaksana	-	-	-	-	-	kosong
16	Pengelola Penanganan Perkara	-	-	-	1	-	1 orang

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2024 mengalami beberapa perubahan personil, terutama pada hakim, unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Guna memperjelas struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setiap pejabat, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :



## 1. Mutasi

Pengadilan Agama Negara Kelas II yang hanya memiliki 15 (lima belas) pegawai dan dibantu 4 (empat) orang PPNPN. Menurut standar jumlah pegawai untuk Pengadilan Tingkat pertama kelas II pada buku I Pedoman Administrasi Peradilan, jumlah pegawai Pengadilan Agama Negara masih belum memenuhi standar tersebut.

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Negara hanya 3 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Kebutuhan hakim Pengadilan Agama Negara masih diperlukan karena sampai Desember 2024 hanya ada 1 (dua) majelis hakim dengan hakim anggota yang sama.

Di bidang kepaniteraan jabatan pokok yang terisi yaitu 1 (satu) orang panitera dan 2 (dua) orang Panitera Muda, Sedangkan jumlah Juru Sita juga masih kurang karena hanya ada 1 (satu) orang Juru Sita dan 1 (satu) orang Juru Sita Pengganti, bahkan tidak memiliki Panitera Pengganti.

Administrasi bidang kepaniteraan juga masih didominasi rangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya petugas meja informasi dan pengaduan dirangkap oleh Panitera Muda Hukum. Kasir



dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Muda Gugatan. Petugas pelayanan juga dirangkap oleh Panitera Muda dan dibantu PPNPN.

Sedangkan di bidang Kesekretariatan tidak semua jabatan pokok terisi, dengan 1 (satu) orang Sekretaris dan hanya 1 (satu) orang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.

Adapun di bidang kesekretariatan masih terdapat kekurangan personil yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, yang sementara ini dijabat oleh seorang Analis Perkara Peradilan sebagai Pelaksana Tugas.

Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia.

Walaupun kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Negara belum semua dapat dipenuhi, namun dengan sumber daya yang terbatas tersebut, Pengadilan Agama Negara tetap berupaya melaksanakan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya dengan pemanfaatan sara pendukung sehingga SDM yang terbatas tetap harus dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pegawai Pengadilan Agama Negara yang mutasi jabatan masuk dan keluar sepanjang tahun 2023 ada 10 (sepuluh) orang sampai dengan bulan Desember 2024, keseluruhan pegawai yang menjadi kekuatan Pengadilan Agama Negara berjumlah 15 (lima belas) orang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun pegawai



yang mutasi jabatan pada Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	Abdul Hamid, S.H.I.	IV/a	Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggara Kelas IB
2	Abdullah, S.H.I., M.H.	IV/b	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II	Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
3	H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.	IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan Kelas II
4	Khairi Rosyadi, S.H.I.	IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
5	Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengadilan Agama Negara Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA
6	Winda Herliana, S.H.	III/c	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Negara Kelas II
7	Muhammad Sya'rawi, S.H.	III/c	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari IB
8	Rahmadi, S.AP.	III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Kelas IB
9	M. Helmi Hidayat, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama
10	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	II/d	Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Negara Kelas II	Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Depok Kelas IA

## 2. Promosi

Pegawai Pengadilan Agama Negara yang mendapat promosi jabatan masuk dan keluar di tahun 2024 ada 10 (sepuluh) orang sampai dengan Bulan Desember 2024, keseluruhan pegawai yang menjadi kekuatan Pengadilan Agama Negara berjumlah 15 (lima belas) orang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun pegawai



yang mengalami promosi jabatan pada Pengadilan Agama Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	
			Lama	Baru
1	Abdul Hamid, S.H.I.	IV/a	Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggara Kelas IB
2	Abdullah, S.H.I., M.H.	IV/b	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II	Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
3	H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.	IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandungan Kelas II
4	Khairi Rosyadi, S.H.I.	IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandungan Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
5	Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengadilan Agama Negara Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA
6	Winda Herliana, S.H.	III/c	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Negara Kelas II
7	Muhammad Sya'rawi, S.H.	III/c	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari IB
8	Rahmadi, S.AP.	III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Kelas IB
9	M. Helmi Hidayat, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Negara Kelas II	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama
10	Alfi Syahrin Taufiq, A.Md.	II/d	Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Negara Kelas II	Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Depok Kelas IA

### 3. Pensiun

Pada tahun 2024, tidak ada Pegawai Pengadilan Agama Negara yang memasuki masa pensiun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Terhitung
-	-	-	-	-



#### 4. Pendidikan dan Latihan (Diklat) SDM Teknis/Non Teknis Yudisial

Pendidikan dan Latihan (Diklat) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja Pegawai. Pada Tahun 2024, Pengadilan Agama Negara telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial yaitu:

##### a. Pendidikan dan Latihan (Diklat) / Bimbingan Teknis / Sosialisasi Secara Luring

1. Abdul Hamid, S.H.I., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. dan Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 12 Januari 2024.
2. Rahmadi, S.AP. dan Alfi Syahrin Taufiq, A.Md. mengikuti Kegiatan PARISAI (Pendampingan Rutin Internalisasi Digipay) – Pendampingan Transaksi Real (Nyata) Melalui Digipay Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 31 Januari 2024.
3. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan MERATUS (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 22 Februari 2024.
4. Rahmadi, S.AP. dan Alfi Syahrin Taufiq, A.Md. mengikuti Kegiatan PARISAI (Pendampingan Rutin Internalisasi Digipay) – Pendampingan Transaksi Real (Nyata) Melalui



Digipay Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 27 Februari 2024.

5. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan MERATUS (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 29 Februari 2024.
6. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. dan Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti Pembinaan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 29 Februari – 01 Maret 2024.
7. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan MERATUS (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 29 April 2024.
8. Abdul Hamid, S.H.I., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. dan Nanda Jazirotus Soraya, A.Md. mengikuti Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 2024.
9. Mustaqimah, S.H.I., dan H. Masrani, S.H. mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2024 Dengan



Tema "Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan" di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 – 26 Juli 2024.

10. Rahmadi, S.AP. dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait Pendampingan Prapembayaran Platform Pembayaran Pemerintah dan Sosialisasi Anti Korupsi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 25 September 2024.
11. Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., H. Masrani, S.H. dan Wahdah, S.H.I. mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepaniteraan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2024 Dengan Tema "Untuk Menyamakan Pemahaman dan Persepsi Dalam Rangka Mengoptimalkan PNBP dan Untuk Mengeliminasi Temuan Terkait Pengelolaan PNBP di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan" di Galaxy Hotel Banjarmasin pada tanggal 25 – 27 September 2024.
12. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait Langkah-Langkah Dalam



Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai pada tanggal 03 Oktober 2024.

**b. Pendidikan dan Latihan (Diklat) / Bimbingan Teknis / Sosialisasi Secara Daring**

1. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait Penyampaian Tips Pengisian Capaian Output pada tanggal 03 Januari 2024.
2. Alfi Syahrin Taufiq, A.Md. mengikuti Sosialisasi Menu Angka Krefit dan Persetujuan PAK Pada Aplikasi e-Kinerja pada tanggal 09 Januari 2024.
3. Nadia Fauzana, S.H. mengikuti Kegiatan Podjok Konsultasi : Sosialisasi Pengisian LHKPN Tahun 2024 pada tanggal 09 Januari 2024.
4. Lissa Dewi Andini, S.H. mengikuti Kegiatan Deklarasi Badan Hakim Perempuan Indonesia (BP HPI) oleh Para Hakim Perempuan Seluruh Indonesia dari Empat Lingkungan Peradilan pada tanggal 12 Januari 2024.
5. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait Pemadanan NPWP 16 Digit SAKTI-SPAN pada tanggal 17 Januari 2024.



6. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H. Muhammad Sya'rawi, S.H., dan Moh. Ramli, S.H.I. mengikuti Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Secara Daring Tahun 2024 dan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2024.
7. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan MERATUS (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) pada tanggal 24 Januari 2024.
8. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait One on One Meeting RPF Halaman III DIPA Triwulan I TA 2024 pada tanggal 13 dan 15 Februari 2024.
9. Rahmadi, S.AP. dan St. Rahmah, S.H.I. mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan pada tanggal 16 Februari 2024.
10. Lissa Dewi Andini, S.H. mengikuti Sosialisasi BPHPI-IKAHI pada tanggal 16 Februari 2024.
11. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Terkait Refreshment SAKTI dan Monitoring Tolakan SPM pada tanggal 21 Februari 2024.



12. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H. Rahmadi, S.AP., Nadia Fauzana, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., Silma Lathifah, S.H., Iswadi Idris, A.Md., Alfi Syahrin Taufiq, A.Md., dan Nanda Jazirotus Soraya, A.Md.A.B. mengikuti Webinar Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 04 Maret 2024.
13. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., dan Moh. Ramli, S.H.I. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Dengan Tema "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama" pada tanggal 15 Maret 2024.
14. Abdul Hamid, S.H.I., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I., dan Nadia Fauzana, S.H. mengikuti Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat dan Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun Tenaga Teknis Panitera dan Jurusita Tahun 2024



Sekaligus Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis pada tanggal 25 Maret 2024.

15. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Ketiga Bulan April 2024 Terkait Penyegaran Modul Komitmen SAKTI Pengisian Capaian Output Sesuai Ketentuan pada tanggal 16 April 2024.
16. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H. Rahmadi, S.AP., Nadia Fauzana, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., Silma Lathifah, S.H., Iswadi Idris, A.Md., Alfi Syahrin Taufiq, A.Md., dan Nanda Jazirotus Soraya, A.Md.A.B. mengikuti Sosialisasi Persiapan Tahapan Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024 pada tanggal 22 April 2024.
17. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Keempat Bulan April 2024 Terkait Refreshment SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran pada tanggal 24 April 2024.
18. Abdul Hamid, S.H.I., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. dan Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti Sosialisasi Nasional



Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/PK Secara Elektronik pada tanggal 26 April 2024.

19. Lissa Dewi Andini, S.H. mengikuti Seminar Internasional Memperingati Hari Perempuan Internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April) tahun 2024 Dengan Tema "Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung" pada tanggal 26 April 2024.
20. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., dan Moh. Ramli mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Dengan Tema "Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)" pada tanggal 03 Mei 2024.
21. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Kedua Mei Terkait Refreshment SAKTI Modul Komitmen pada tanggal 08 Mei 2024.
22. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan Meratus (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) Bulan Mei 2024 pada tanggal 13 Mei 2024.



23. Akhmad Muzakkir, S.H.I., Rahmadi, S.AP., dan Silma Lathifah, S.H. mengikuti Sosialisasi Penertiban Barang Milik Negara Dalam Rangka Implementasi SIMAN V2 pada tanggal 14 Mei 2024.
24. Alfi Syahrin Taufiq, A.Md. mengikuti Kegiatan PARISAI (Pendampingan Rutin Internalisasi Digipay) - Pendampingan Transaksi Real (Nyata) Melalui Digipay Satu pada tanggal 15 Mei 2024.
25. Akhmad Muzakkir, S.H.I., dan Rahmadi, S.AP. mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengusulan RKBMN Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya pada tanggal 17 Mei 2024.
26. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., dan Muhammad Sya'rawi, S.H., dan Moh. Ramli, S.H.I. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Dengan Tema "Contra Legem" pada tanggal 17 Mei 2024.
27. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Kelima Bulan Mei 2024 Terkait Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2024 pada tanggal 27 Mei 2024.



28. Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I., Mustaqimah, S.H.I., Rahmadi, S.AP., dan Silma Lathifah, S.H. mengikuti Sosialisasi Pelaporan Pagu DIPA 04 Kinsatker pada tanggal 04 Juni 2024.
29. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Pertama Bulan Juni 2024 Terkait Perekaman Perpanjangan Sertifikasi Bendahara Tahun 2024 pada tanggal 05 Juni 2024.
30. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan Meratus (Media Rekonsiliasi Data Keuangan Satker) Bulan Juni 2024 pada tanggal 13 Juni 2024.
31. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., dan Muhammad Sya'rawi, S.H. mengikuti Dialog Yudisial MARI – FCFCOA Tema “Identifikasi dan Penanganan KDRT Dalam Perkara Hukum Keluarga” dan “Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama” pada tanggal 26 dan 27 Juni 2024.
32. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Pertama Bulan Juli 2024 Terkait Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran pada tanggal 04 Juli 2024.



33. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Kedua Bulan Juli 2024 Terkait Kebijakan Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Karier Jabatan Fungsional Bidang APBN pada tanggal 10 Juli 2024.
34. Rahmadi, S.AP., dan St.Rahmah, S.H.I. mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan tanggal 12 Juli 2024.
35. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Hybrid oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagi Jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada tanggal 18 – 19 Juli 2024.
36. Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Sosialisasi Penggunaan CMS Rekening Virtual pada tanggal 22 Juli 2024.
37. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Dengan Tema "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)" pada tanggal 26 Juli 2024.



38. Akhmad Muzakkir, S.H.I., dan Rahmadi, S.AP. mengikuti Sosialisasi Pengusulan Pengelolaan Barang Milik Negara pada SIMAN v2 pada tanggal 16 Agustus 2024.
39. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Dengan Tema "Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan" pada tanggal 23 Agustus 2024.
40. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., Rahmadi, S.AP., dan Nadia Fauzana, S.H. mengikuti Sosialisasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi Melalui Aplikasi E-Binwas pada tanggal 26 Agustus 2024.
41. Rahmadi, S.AP. mengikuti Sosialisasi Fitur Standarisasi Aplikasi e-SADEWA pada tanggal 26 Agustus 2024.
42. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Keempat Bulan Agustus 2024 Terkait Evaluasi IKPA dan Pendaftaran User SPAN EXT pada tanggal 28 Agustus 2024.



43. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan Refreshment Teknis Gaji Web dan SAKTI serta Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah pada tanggal 18 September 2024.
44. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dan Disiarkan Secara Langsung/Live Streaming Melalui Badilag TV Dengan Tema "Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah" pada tanggal 27 September 2024.
45. Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., dan Nanda Jazirotus Soraya, A.Md.A.B. mengikuti Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.6 dan Aplikasi e-Court Versi 6.0.0 pada tanggal 03 Oktober 2024.
46. Akhmad Muzakkir, S.H.I., dan Silma Lathifah, S.H. mengikuti Monitoring Nilai Kinerja Perencanaan Triwulan III TA 2024 pada Satuan Kerja melalui Aplikasi SMART DJA pada tanggal 04 Oktober 2024.
47. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya'rawi,



- S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Seminar Nasional Waris Dengan Tema “Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah dalam Bandel Waris (Tirkah)” pada tanggal 11 Oktober 2024.
48. Abdul Hamid, S.H.I., H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., Lissa Dewi Andini, S.H., Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Muhammad Sya’rawi, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Seminar Nasional Kepailitan, Dengan Tema “Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah” pada tanggal 18 Oktober 2024.
49. Rahmadi, S.AP. mengikuti Kegiatan KETUPAT HARUAN (Kelompok Tukar Pendapat Hari Rabu Tentang Perbendaharaan) Minggu Ketiga Bulan November Tahun 2024 Terkait One on One Meeting Monitoring Pagu Minus dan Deviasi RPD pada tanggal 13 November 2024.
50. Abdullah, S.H.I., M.H., Khairi Rosyadi, S.H.I., Lissa Dewi Andini, S.H., Winda Herliana, S.H., Mustaqimah, S.H.I., H. Masrani, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dan Disiarkan Secara Langsung/Live Streaming Melalui Badilag TV Dengan Tema "Perlawanan Eksekusi" pada tanggal 15 November 2024.
51. Abdullah, S.H.I., M.H., Khairi Rosyadi, S.H.I., Lissa Dewi Andini, S.H., Winda Herliana, S.H., Mustaqimah, S.H.I., H.



Masrani, S.H., Moh. Ramli, S.H.I., dan Iswadi Idris, A.Md. mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Hasil Pengawasan Perlindungan Anak, KPAI Tahun 2024 Dengan Tema "Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas" pada tanggal 19 – 20 November 2024.

52. Abdullah, S.H.I., M.H., Khairi Rosyadi, S.H.I., Lissa Dewi Andini, S.H., Winda Herliana, S.H., dan Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti "Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dilanjutkan Sosialisasi Hasil Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo berupa Sistem Penunjang Putusan Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama/Aplikasi Dispenku dan Kuliah Tamu yang disampaikan oleh Dosen Hukum Keluarga Islam IAIN Metro, Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I. Dengan Tema "Dispensasi Kawin dalam Konteks Maqashid Syariah: Menjamin Kepentingan Terbaik bagi Anak untuk Mewujudkan Keadilan Sosial" pada tanggal 29 November 2024.
53. Abdullah, S.H.I., M.H., Khairi Rosyadi, S.H.I., Lissa Dewi Andini, S.H., Winda Herliana, S.H., dan Akhmad Muzakkir, S.H.I. mengikuti Seminar Nasional Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 Dengan Tema "Teguhkan Komitmen



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel*

BerAKHLAK

#bangga  
#melayani  
#bangsa



Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju” pada tanggal 09  
Desember 2024.



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402571/2024 tertanggal 24 November 2023, mendapatkan alokasi dana yang setelah beberapa kali direvisi menjadi sebesar Rp. 2.730.130.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi sebesar Rp. 2.669.895.352,- atau dikonversi 97,79 % dan sisa Anggaran pada Pagu DIPA 01 sebesar Rp.60.234.648.- atau dikonversi 2,21% , serta DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402572/2024 tertanggal 24 November 2023, mendapatkan alokasi dana senilai Rp.99.050.000,- (sembilan puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah), Realisasi Rp.96.950.000.- atau dikonversi sebesar 97,88%.

**1. Belanja Pegawai**

**Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Agama Negara**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	PA. NEGARA	<b>1.869.492.000</b>	1.828.099.973	41.392.027	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024



senilai Rp **1.869.492.000** (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Realisasi untuk belanja pegawai selama periode tahun anggaran ini mencapai persentase **97,79%** yaitu sebesar Rp.1.828.099.973. (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2024.

**2. Belanja Barang**

**Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Negara**

**Tahun Anggaran 2024**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	860.638.00,-	841.795.379,-	18.842.621,-	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Negara Kelas II tahun 2023 yaitu dari DIPA 01. Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp. 860.638.000,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **97,81%** yaitu sebesar Rp.841.795.379,- (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp 18.836.848,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).



## Rekapitulasi Belanja Barang Non Operasional Pada Pengadilan Agama Negara

### Tahun Anggaran 2024

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	0,-	0,-	0,-	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang Non Operasional pada Pengadilan Agama Negara Kelas II tahun 2024 yaitu dari DIPA 01. Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp. 0,- Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentase **0%** yaitu sebesar Rp. 0,-

### 3. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Agama Negara tidak mendapatkan belanja modal.

### 4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Agama Negara mendapatkan alokasi dana **DIPA 04 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402572/2024** tertanggal 24 November 2023, mendapatkan alokasi dana senilai Rp. 99.050.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.



**Rekapitulasi Belanja Jasa Pos Pelayanan Hukum  
(POSBAKUM) Pada Pengadilan Agama Negara**

**Tahun Anggaran 2024**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	30.000.000,-	30.000.000,-	0	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang Jasa Konsultasi pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan pada Pengadilan Agama Negara tahun 2024 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dialokasikan untuk jasa Pos pelayanan Hukum Pengadilan, telah terealisasi mencapai persentase **100% yaitu sebesar Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 0,-** (nol).

**Rekapitulasi Belanja Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)**

**Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	30.250.000,-	28.150.000,-	2.100.000,-	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) Pengadilan Agama Negara pada Pengadilan Agama Negara tahun 2024 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh delapan dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pembebasan Biaya Perkara



(prodeo) Pengadilan Agama Negara, telah terealisasi mencapai persentase **93,06%** yaitu sebesar Rp. 28.150.000,- (dua puluh delapan seratus lima puluh ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah).

**Rekapitulasi Belanja Sidang Diluar Gedung**

**Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2024**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	PA. NEGARA	38.800.000,-	38.800.000,-	0	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggaran belanja barang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Negara pada Pengadilan Agama Negara tahun 2024 yaitu dari DIPA 04. Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Negara Kelas II sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Negara, telah terealisasi mencapai persentase **100%** yaitu sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sisa anggaran belanja barang sebanyak **Rp. 0,-** (nol).

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan perkara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Perkara Tahun 2024**

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Ket.
	<u>Saldo Awal Tahun 2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1	Januari	24.139.000	18.461.000	
2	Februari	17.513.000	12.223.000	
3	Maret	14.070.000	12.180.000	
4	April	9.030.000	5.860.000	
5	Mei	20.930.000	15.926.000	
6	Juni	14.164.000	10.516.000	
7	Juli	20.953.000	18.223.000	
8	Agustus	13.490.000	10.041.500	
9	September	8.398.500	6.053.500	



10	Oktober	11.020.000	6.434.000	
11	Nopember	11.011.000	9.242.000	
12	Desember			
<b>Jumlah</b>		<b>,-</b>	<b>,-</b>	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan ditambah saldo lalu sejumlah **Rp.152.195.000,-** dan pengeluaran sejumlah **Rp.150.621.000,-** maka sisa akhir/saldo tahun anggaran 2024 sejumlah **Rp.1.574.000,-**

Adapun rincian pengeluaran biaya perkara dalam tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Pengeluaran Biaya Perkara 2024**

No	Jenis Pengeluaran	Banyaknya	Keterangan
1.	Biaya Panggilan	61.238.500,-	
2.	Pemberitahuan putusan	14.603.500,-	
3.	Pengiriman biaya perkara	0,-	
4.	Meterai	2.220.000,-	
5.	ATK Perkara/Pemberkasan	16.650.000,-	
6.	Hak-hak kepaniteraan	14.730.000,-	
7.	Pengembalian Sisa Panjar	38.669.000,-	
8.	Biaya PS	2.510.000,-	
9.	Lain-lain	0,-	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.150.621.000,-</b>	

Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Agama Negara telah melakukan upaya yang terbaik agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan baik dan akuntabel yang selalu akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024, beberapa apresiasi dan penghargaan yang didapat pengadilan Agama Negara dalam pengelolaan keuangan negara, baik dari lembaga internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:



No	Nama Penghargaan	Peringkat	Instansi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat / Piagam	Tanggal Penghargaan
1	Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 2022	1	PTA Banjarmasin	W15- A/266/KP.05.8/1/2023	27 Januari 2023
2	Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 2022	2	PTA Banjarmasin	W15- A/266/KP.05.8/1/2023	27 Januari 2023
3.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan DIPA 04 dan 01 Maret 2023	2 dan 3	KPPN Barabai	S-422 /KPN.1903//2023	12 April 2023
4	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran DIPA 04 dan 01 Maret 2023	2 dan 3	KPPN Barabai	S- 287/KPN.1903//2023	14 Maret 2023
5.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan DIPA 04 Februari 2023	2	KPPN Barabai	S- 287/KPN.1903//2023	14 Maret 2023
6.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran DIPA 04 dan 01 Juli 2023	1 dan 2	KPPN Barabai	S- 821/KPN.1903//2023	14 Agustus 2023
7.	Apresiasi atas ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan DIPA 01 dan 04 Agustus 2023	1 dan 2	KPPN Barabai	S- 910/KPN.1903//2023	14 September 2023



10.	Penghargaan Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan DIPA 01 dan 04 Semester I 2023	1 dan 2	KPPN Barabai	78/KPN.1903//2023	7 September 2023
11	Penghargaan Penyerapan Anggaran DIPA 04 Semester I Tahun 2023	1	KPPN Barabai	62/KPN.1903//2023	5 September 2023
12.	Penghargaan Penilaian IKPA DIPA 01 Semester I Tahun 2023	1	KPPN Barabai	45/KPN.1903//2023	4 Agustus 2023

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kinerja suatu satuan kerja. Jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan menghambat pelaksanaan kinerja.

Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2024 masih memiliki gedung yang belum prototype dan masih menggunakan gedung lama. Meskipun gedung lama, pengaturan ruangan dan sarana prasarana yang ada, dimaksimalkan agar memenuhi standar akreditasi penjaminan mutu.

### 1. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Negara

Data sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Negara hingga akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang sidang	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	



9	Ruang Perpustakaan	1	
10	Ruang Arsip perkara	1	
11	Ruang bermain anak & Laktasi	1	
12	Ruang Tunggu Sidang	1	
13	Ruang Mediasi	1	
14	Ruang Bendahara Pengeluaran	1	
15	Ruang I.T	1	
<b>SARANA PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN</b>			
1	Server	2	
2	Komputer/P.C	43	14 rusak berat
3	Laptop	29	9 rusak berat
4	Printer	23	6 Rusak Berat
5	Mesin Ketik	1	rusak berat
6	Mesin fotokopi	2	1 rusak berat
7	Genset	2	
8	Meja kerja	49	
9	Kursi Besi	64	8 rusak berat
10	Lemari Besi	1	
11	Lemari Kayu	23	
12	AC	14	1 rusak berat
13	CCTV	7	
14	LCD TV	1	
15	Faximile	1	
16	UPS	13	5 Rusak Berat
17	Wireless	6	

## 2. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehaan	Kondisi			Keterangan
			Baik	R.Ringan	R.Berat	
<b>I. Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Toyota Inova	2006	-	1	-	Rusak ringan
2.	Mitsubishi Xpander	2023	1	-	-	Sewa MA
3.	Suzuki XL7	2024	1	-	-	Pinjam Pakai
<b>II. Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Honda Gl.160	2008	-	-	1	Rusak berat
2	Honda Supra x125 R PGM-F.1	2008	1	-	-	Baik
3	Honda GL.160	2007	-	-	1	Rusak berat
4	Honda NF 125 SD	2005	-	1	-	Rusak ringan
5	Honda Supra Fit	2004	-	1	-	Rusak ringan

## 3. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	R.Ringan	R.Berat	



1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Negara dalam upayanya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, telah mempunyai website yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta menjadi media komunikasi baik antar sesama peradilan di tingkat pertama, tingkat banding, badilag dan Mahkamah Agung, juga menjadi media komunikasi dengan masyarakat luas. Melalui website, Pengadilan Agama Negara menyajikan informasi berupa informasi tentang Pengadilan Agama Negara, yaitu program dan kegiatan seperti jadwal sidang, panggilan gaib, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA Pengadilan Agama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan serta aplikasinya lainnya yang dapat terhubung dengan Pengadilan yang di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Badilag, Mahkamah Agung dan BAWAS MA RI.

Media informasi dan komunikasi lainnya Pengadilan Agama Negara dengan adanya *Facebook, Instagram, Tik Tok dan Youtube*



yang menjadi media informasi setiap kegiatan dan perkembangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara, yang dapat dilihat direspon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh semua lapisan masyarakat;

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Agama sangat mengutamakan Teknologi Informasi yaitu adanya *E-office* sebagai pendukung pekerjaan setiap pegawai, baik dalam bentuk aplikasi dari Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Aplikasi pendukung yang diciptakan oleh Pengadilan Agama Negara sebagai inovasi untuk menunjang tugas dan pelayanan Pengadilan Agama Negara demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Aplikasi penunjang dan pendukung kinerja berbasis teknologi informasi, juga diterapkan di Pengadilan Agama Negara sebagai pendukung keefektifan dan keefisienannya pelaksanaan kinerja. Aplikasi-aplikasi ini ada yang menunjang bidang pelayanan, bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan.

Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Negara di bidang pelayanan adalah:

No	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	Website PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	2010
2	PTSP Online Badilag	Badilag	Aplikasi konfirmasi pelayanan Badilag	Januari 2022
3	Aplikasi e-Remun PA Negara	PA. Negara	Aplikasi Register Informasi dan Pengaduan	Juni 2019



4	e-Court	MA-RI	Pendaftaran Perkara secara online	2018
5	SIWAS	MA-RI	Aplikasi Pengaduan BAWAS	2018
6	Direktori Putusan Mahkamah Agung	MA-RI	Kumpulan Putusan MARI	2010
7	A.C.O. Integred System Information	Badilag	Memuat segala informasi Mengenai suatu Perkara kepada personal pengguna pengadilan, terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.	September 2019
8	SMS Information dan Notifikasi Perkara	Badilag	Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).	September 2019
9	IP Mobile Perkara	PTA Banjarmasin	Info perkara secara elektronik melalui HP	Juni 2019



10	Aplikasi Antrian Sidang	Badilag	aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.	September 2019
11	Website MA-RI	MARI	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan Mahkamah agung	-
12	Website Badilag MA-RI	Badilag	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan Badilag	-
13	Website PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PTA. Banjarmasin	-
14	Youtube PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	11 Agustus 2018
15	Facebook PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	Januari 2019
16	Instagram PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	Januari 2019
17	Layanan PTSP Online PA. Negara Whatsaap	PA. Negara	Informasi layanan PA. Negara melalui whatsapp	Januari 2019
18	TikTok PA Negara	-	Sarana publikasi dan informasi kebijakan dan kegiatan PA. Negara	25 Juli 2022
19	Layanan Booking Produk Pengadilan selama Pandemi	PA. Negara	Untuk mendukung penerapan standar pelayanan masa pandemik Covid-19 disediakan layanan pengambilan produk Pengadilan seperti Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan, pengguna layanan terlebih dulu menghubungi layanan PTSP Online untuk mengutarakan maksudnya, selanjutnya petugas penyerahan produk pengadilan segera	April 2022



			menyiapkan dokumen yang diminta dan menentukan waktu kapan produk tersebut bisa diambil sehingga pengguna layanan tidak memakan waktu lama berada di lingkungan kantor PA. Negara	
20	Aplikasi Sistem Informasi Panduan Berperkara (SIPADUKA)	PA Negara	Untuk memberikan kemudahan informasi kepada para pengguna layanan peradilan agama khususnya kaum rentan	November 2022
20	Double monitor	PA. Negara	transparansi biaya perkara menampilkan rincian biaya perkara saat pihak melakukan transaksi pada kasir	Januari 2019
21	Survei Persepsi Korupsi	PA. Negara	Aplikasi Survey Korupsi Online	Juni 2022
22	Survei Kepuasan Masyarakat	PA. Negara	Aplikasi Survey kepuasan Masyarakat online	Juni 2022
23	Inspirasi Kamis (Inkam)	PA. Negara	Kegiatan rutin setiap hari kamis dengan beribadah Bersama serta mendengarkan tausiyah agama untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan PA Negara	November 2022
24	Reportase Dalam Sebulan (ETALASE)	PA Negara	Program siaran berita seputar kegiatan Pengadilan Agama Negara yang di tayangkan pada kanal Youtube PA Negara	15 Mei 2023

Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Negara dibagian kepaniteraan adalah :

No	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	Aplikasi SIPP PA Negara	MA-RI	Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan <b>aplikasi</b> berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara ( <b>Fungsi</b> administrasi),	2016
2	Aplikasi E-Register	PTA Banjarmasin	Register perkara secara elektronik	Februari 2019
3	KPP-V2 PA Negara	PA. Negara	Aplikasi Kontrol Produk Pengadilan	Januari 2022
4	Validasi Data Akta Cerai	PA. Negara	Aplikasi Validasi Data Akta Cerai Lokal PA Negara	Januari 2022



5	Aplikasi ABT (Aplikasi Blangko Terintegritas)	PA. Negara	Aplikasi formulir Berita Acara Sidang, Putusan dan Formulir persidangan lainnya.	Januari 2019
6	Aplikasi DESPA	PTA Banjarmasin	Kontrol Dokumen elektronik SIPP Peradilan Agama	Januari 2019
7	Aplikasi PEDIS	PTA Banjarmasin	Pengawasan input Data Isian SIPP	Januari 2018
8	Aplikasi Kontrol Keuangan Perkara	PTA Banjarmasin	Kontrol administrasi Keuangan Perkara	Januari 2018
9	Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara Buku Kas Umum	PTA Banjarmasin	Kontrol Keuangan Perkara Buku Kas Umum	Januari 2018
10	Aplikasi e- Panjar	PA. PALU	Aplikasi menghitung panjar mandiri oleh pihak layanan. Panjar perkara dapat dihitung langsung oleh pihak berperkara tanpa perlu datang atau dibantu oleh pegawai PA. Negara, sehingga keterbukaan biaya perkara dapat transparan	Januari 2019
11	Aplikasi Simtalak Badilag Basis Data Terpadu Kemiskinan	Badilag	Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014..	September 2019
12	Aplikasi Simtalak Badilag PNBP	Badilag	Aplikasi monitoring PNBP, eksaminasi Putusan, kinerja Penyelesaian perkara seluruh Indonesia. .	September 2019
13	Aplikasi Register Perkara	Badilag	e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat	September 2019



			dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.	
14	e-Keuangan Perkara	Badilag	Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).	September 2019
15	APS Badilag (Aplikasi Pendukung SIPP)	Badilag	aplikasi pendukung SIPP yang beriki aplikasi Register Perkara, aplikasi Keuangan dan aplikasi ABT	
16	E-Kaper	PTA Banjarmasin	Aplikasi Kontrol penggunaan biaya proses perkara, dapat mengontrol pembelian dan pemakaian aplikasi ATK Perkara,	Juni 2019
17	Aplikasi e-Paisan	PTA Banjarmasin	Aplikasi kontrol dan monitoring perkara yang diajukan banding ke PTA. Banjarmasin	Juni 2019
19	Aplikasi Direktori Putusan	MARI	Aplikasi himpunan Putusan MARI	2016



20	SIMPONI PNPB Online	Kemnkeu RI	Aplikasi pembuatan billing untuk penyetoran PNPB Penerimaan dan pelaporan PNPB ke Kemnkeu RI	Januari 2018
22	Komdanas	MARI	Aplikasi pelaporan keuangan Perkara ke MARI	Januari 2018
22	SIMARI	MARI	Aplikasi pelaporan PNPB perkara ke MARI	Januari 2018
23	SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)	Kemnkeu RI	Aplikasi Pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan ke KPPN	Januari 2018
24	Sistem Monitoring Implementasi SIPP	Tim IT PA Muara Bulian	Aplikasi Sistem Monitoring Implementasi SIPP	Juli 2022

Beberapa aplikasi berbasis teknologi yang mendukung kinerja di kesekretariatan adalah :

No	Nama Inovasi	Pengembangan Aplikasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan
1	SIKEP MARI	MA-RI	Sistem Informasi Kepegawaian MARI	2010
2	ROPEG MARI	MA-RI	Kendali dan pengusulan penghargaan Satyalencana	2018
3	SIKEP ABS MARI	MA-RI	Sistem Informasi Kepegawaian Badilag	2010
4	Aplikasi e-Remun PA Negara	PA. Negara	Aplikasi Register Informasi dan Pengaduan	Juni 2019
5	Aplikasi Online LHKPN	KPK	Aplikasi Laporan harta Kekayaan, Untuk hakim, Sekretaris & Pejabat Kepaniteraan	2017
6	Aplikasi Online LHKSAN	KPK	Aplikasi Laporan harta kekayaan untuk pegawai	2017
7	APRI (Aplikasi Tata Persuratan)	PTA Banjarmasin	Tata Persuratan Surat Masuk dan Surat Keluar	Juni 2019
8	Aplikasi Absensi Online	MA-RI	Aplikasi Absen Online Pegawai MARI terintegrasi ke aplikasi SIMARI dan aplikasi KOMDANAS MARI	2019
9	A-Ziap (Monitoring Kerja Administrasi APM dan ZI)	PTA Banjarmasin	Aplikasi monitoring kerja administrasi APM & ZI	Januari 2022
10	Aplikasi Joomla PA Negara (Admin Website PA)	PTA Banjarmasin	Aplikasi Informasi Admin Website PA Negara	Juni 2019



	Negara)			
11	SIMARI	MA-RI	Sistem informasi data Mahkamah Agung Republik Indonesia	Januari 2019
12	e-SAKIP REVIU	Menpan RB	Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana pencapaian laporan kinerja secara online	Januari 2022
13	PMPZI	Menpan RB	Applikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	2022
14	SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)		Aplikasi tentang asset-aset yang ada di Pengadilan Agama Negara	2017
15	Omspan Ditjen Perbendaharaan		Monitoring pendapatan dan pelaporan DIPA	2018
16	OM-SPAN		Monitoring pendapatan dan pengeluaran DIPA	2018
17	Aplikasi SEJATI 110 KPPN Barabai		Aplikasi KPPN untuk mempermudah mitra kerja untuk memonitoring download aplikasi dan surat menyurat	2019
18	SIPERMARI (Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI)		Aplikasi MA untuk mempermudah satuan kerja memantauahakan asset BMN dibawah lingkungan kerja MA-RI	2019
19	SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)		Aplikasi dari kementerian keuangan untuk rekonsiliasi rekening bendahara LPJ bendahara penerimaan dan pengeluaran	2018
20	E-Monev PP 39		Aplikasi dari kementerian keuangan bapenas untuk monitoring dan evaluasi	2018
22	SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Menteri Keuangan)		Kinerja satker. Aplikasi dari kementerian keuangan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja satker	2017
22	KOMDANAS		Aplikasi kepegawaian dan Keuangan	2015
23	SIMPONI		Aplikasi dari kementerian keuangan berupa pajak penerimaan	2011
24	DJP Online		Aplikasi pajak pengeluaran bendahara untuk disetor ke kas Negara	2011
25	E-Suzik	PA Negara	Aplikasi Surat Izin Keluar PA Negara	2020



26	Gmail PA Negara		Sarana berkirim surat dan penyimpanan fail melalui internet, melampirkan dokumen dalam bentuk file gambar, video maupun audio.	2010
27	DIMAS	PA Negara	Aplikasi Disposisi Surat Masuk	November 2022

Dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan telah didukung adanya inovasi program dari Mahkamah Agung RI berupa e-Court dan SIPP yang telah diterapkan dalam penerimaan perkara, dan Pengadilan Agama Negara telah mengimplementasikanya sebagai berikut:

**1. Implementasi e-Court**

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi e-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online).

Sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagai revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, maka pada tahun 2023 Pengadilan Agama Negara menerima Perkara secara e-Court sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara baik dari pengguna



terdaftar maupun dari pengguna lain (perorangan), baik perkara permohonan maupun gugatan.

Sedangkan untuk perkara secara E-Litigasi sebanyak 24 perkara, yang terdiri dari perkara permohonan.

Semakin meningkatnya para pihak memilih dengan mendaftarkan secara e-Court karena para pihak yang selain pengguna atau perorangan lebih kepada alasan ringannya biaya perkara jika dibandingkan dengan pendaftaran secara manual, hal sebagai penyebab meningkatnya perkara masuk melalui e-Court, selain itu juga memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Negara, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

### **Implementasi SIPP**

Terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Negara telah menyediakan subdomain website yang secara khusus menampilkan informasi perkara, yaitu <http://sipp.pa-negarakalsel.net>. Pada situs tersebut termuat informasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dan diupdate setiap hari.

Secara garis besar, dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP di antaranya adalah sebagai berikut:

- Server khusus untuk SIPP
- Aplikasi SIPP versi 5.6.4
- Ruang server



- AC pada ruang server
- Subdomain <http://sipp.pa-negarakalsel.net> untuk menampilkan informasi perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat (publikasi perkara)
- Penyediaan *uninterruptible power supply* (UPS) pada computer server

“*One Day Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Agama Negara akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Perkara bisa saja tidak *one day publish*, jika koneksi internet yang kurang bagus dan tidak stabil, atau adanya pemadaman aliran listrik pada hari tersebut.

Berikut keadaan perkara yang *One Day Publish* di Pengadilan Agama Negara selama tahun 2024:

NO	BULAN	PERKARA PUTUS	ONE DAY ONE PUBLISH	TIDAK ONE DAY ONE PUBLISH
1	JANUARI	22	22	0
2	FEBRUARI	62	62	0
3	MARET	30	30	0
4	APRIL	7	7	0
5	MEI	22	22	0
6	JUNI	24	24	0
7	JULI	29	29	0
8	AGUSTUS	21	21	0
9	SEPTEMBER	18	18	0
10	OKTOBER	17	17	0
11	NOVEMBER	43	43	0



12	DESEMBER	71	71	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>0</b>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk terwujudnya *one day one publish*, yaitu :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
2. Pembinaan dan sosialisasi peraturan hukum acara
3. Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Penyempurnaan SOP persidangan
5. Tim akan selalu memantau publikasi informasi di website.

Dalam penanganan perkara dan keseluruhan kinerja, tahun 2023 Pengadilan Agama Negara mendapat beberapa penghargaan, baik dari internal lembaga maupun dari lembaga eksternal, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Instansi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat / Piagam	Tanggal Penghargaan
1	Penghargaan Percepatan Penyelesaian perkara Semester II 2022	1	PTA Banjarmasin	W15-A/266/KP.05.8/1/2023	27 Januari 2023
2	Penghargaan Atas Hasil Kinerja SIPP	1	PTA Banjarmasin	W15-A/266/KP.05.8/1/2023	27 Januari 2023
3.	Penggunaan E-MA	2	PTA Banjarmasin	W15-A/266/KP.05.8/1/2023	27 Januari 2023
5.	Penilaian Rapor SIPP Januari - Desember 2023	1	Dirjen Badilag		Setiap Bulan



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)**

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau "*excellent service*" pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini meliputi empat aspek, yaitu Administrasi manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Negara sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah diasesmen oleh Asesor Eksternal Tim Penjaminan Mutu Badilag dan mendapat nilai A (Excellent), sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Nomor 472/DjA/SETT-APM/IX/2018.

Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pengadilan Agama Negara telah menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu dan telah menerapkan manajemen resiko sebagaimana pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu terbaru bulan Oktober 2018.



Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) meliputi 7 (tujuh) kategori area, yang tidak hanya pemenuhan dokumen, tetapi implementasi dari pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). 7 (tujuh) kategori area tersebut adalah :

1. Kepemimpinan
2. Customer Focus
3. Proses Management
4. Strategic Planning
5. Resources Management
6. Dokumen System
7. Performance Result

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Negara dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun dan wajib dilakukan evaluasi berupa surveillance setiap tahunnya oleh Tim Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Tahun 2019 telah dilakukan surveillance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 28 dan 29 November 2019 dengan masih mempertahankan nilai A (*Excellent*).

Pada tahun 2021 kembali dilakukan surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 22 dan 28 Oktober 2021, namun sampai saat ini belum ada hasil penilaian dari komite Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Meskipun demikian Hasil surveillance berupa permintaan perbaikan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama



Negara pada tanggal 19 November 2021. Dan Selama Tahun 2022 dan 2023 belum ada pelaksanaan surveillence dari Komite Akreditasi Penjamin Mutu dari Badilag.

**1. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)**

Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2018 hingga saat ini telah menerapkan pelayanan sesuai surat Dirjen tersebut.

Adapun pelayanan yang diselenggarakan melalui PTSP Pengadilan Agama Negara selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2024**

No.	Bulan	Jenis Layanan									Ket
		Permohonan Informasi	Pendaftaran Perkara	Pembayaran Biaya	Penyerahan Produk Pengadilan	Pengajuan Keluhan/Pengaduan	Pemberian Bantuan Hukum (Posbakum)	Penyetoran Panjar Biaya Perkara (Bank)	Pembelian Materai dan Legalisir (PT.Pos)	Layanan Penunjang Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	2	83	35	35	0	0	33	389	0	
2	Pebruari	0	22	19	19	0	25	16	53	0	
3	Maret	0	17	30	31	0	25	14	77	0	
4	April	1	10	31	31	0	25	10	35	0	



5	Mei	0	32	12	12	0	25	24	130	0
6	Juni	0	13	31	40	0	25	13	52	0
7	Juli	0	29	27	32	0	25	23	105	0
8	Agustus	0	22	24	28	0	25	18	89	0
9	September	0	68	79	92	0	75	57	313	0
10	Oktober	0	32	29	36	0	25	21	153	0
11	November	0	50	22	24	0	25	19	274	0
12	Desember	0	41	31	67	0	50	14	255	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>419</b>	<b>370</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>262</b>	<b>1.925</b>	<b>0</b>

Catatan :

\*) Permohonan Informasi Permintaan Data Statistik Perkara tahun 2024 Pengadilan Agama Negara dari BPS Kab.Hulu Sungai Selatan.

## 2. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Penerapan 9 aplikasi inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Negara telah menerapkan aplikasi Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan himbauan memasang poster 11 aplikasi unggulan Dirjen Badilag sesuai surat nomor: 1517/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2021 yaitu:

- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk



- Aplikasi Antrian Sidang
- Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K)
- Command Center Badilag
- Aplikasi e-Eksaminasi
- Aplikasi PNBP Fungsional
- E- Register Perkara
- E-KuanganPerkara
- PTSP Online Badilag
- Validasi Akta Cerai

Disamping itu Pengadilan Agama Negara juga telah menerapkan aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu:

- Apri (Aplikasi Persuratan)
- Aplikasi SPPD (Perjalanan Dinas)
- E-Kaper (Aplikasi Kontrol ATK Perkara)
- IP Mobile (Aplikasi Informasi perkara)
- Wasab (Aplikasi Pengawasan dan Absensi Online)
- Aplikasi E- Paisan (Aplikasi kontrol dan monitoring perkara yang diajukan banding ke PTA. Banjarmasin)
- A-Ziap (Monitoring Kerja Administrasi APM dan ZI)
- E-Remun (Aplikasi Buku Tamu dan Informasi Pengadilan)

E-Remun merupakan aplikasi inovasi Pengadilan Agama Negara yang dijadikan sebagai aplikasi PTA Banjarmasin.



Aplikasi Internal yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Negara.

- Pedis (Pengawasan Data Isian SIPP)
- Aplikasi Kontrol Validasi Data SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara SIPP
- Aplikasi Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara Buku Kas Umum
- Aplikasi Kontrol Keuangan Perkara
- Aplikasi Antrian Pelayanan PTSP
- Aplikasi DESPA (Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama)
- ABT (Aplikasi Blangko Terintegrasi)
- Aplikasi Validasi Data Akta Cerai
- E-Panjar.
- KPP-V2 (Aplikasi Kontrol Produk Pengadilan)
- Aplikasi Sikep Mahkamah Agung RI
- Dan lain-lain

Selain menerapkan aplikasi-aplikasi dari Dirjen Badilag maupun dari PTA Banjarmasin, Pengadilan Agama Negara juga memiliki aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pengadilan Agama Negara.

No.	Nama Aplikasi	Efektif dioperasikan	Uraian singkat
1.	E- REMUN (Aplikasi Register Informasi dan Pengaduan)	Juni 2019	Latar belakang dibuat aplikasi ini adalah karena pada aplikasi e-register Badilag tidak mengakomodir registrasi untuk Informasi dan Pengaduan sehingga pencatatannya tetap manual, agar semua register yang diterapkan di



			PA. Negara menggunakan aplikasi maka di buat aplikasi E-REMUN bulan September 2019 yang mampu melengkapi kekurangan menu pada Aplikasi E-Register Badilag. Menu dari aplikasi ini selain registrasi informasi dan pengaduan juga memuat data tamu yang berkunjung ke PA. Negara. Aplikasi E-REMUN telah di launching bersama-sama dengan Aplikasi dan inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin oleh Dirjen Badilag tanggal 23 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Saat ini telah diterapkan di seluruh unit kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2	E-SUZIK (Aplikasi elektronik Surat Izin Keluar)	Mei 2022	Latar belakang : hasil Diklat PKP sekretaris PA Negara tahun 2022 di Pusdiklat MARI membuat inovasi di satker, dengan minimnya SDM yang ada di PA Negara yang menjadikan tidak semua pekerjaan dapat di laksanakan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga untuk dapat terlaksana semua pekerjaan muncul ide aplikasi yang dapat mendukung kinerja bagian kepegawaian dalam hal terkait dengan penerbitan seluruh surat izin bagi pegawai, aplikasi tersebut dengan SUZIK surat izin keluar yang fungsinya untuk kendali atau pengawasan secara otomatis melalui aplikasi tersebut.

Sebagai bentuk nyata layanan Pengadilan Agama Negara kepada masyarakat, selain menerapkan aplikasi-aplikasi yang mempermudah pekerjaan, Pengadilan Agama Negara juga telah membuat layanan inovasi non aplikasi yang bertujuan untuk memberikan “*excellent service*” kepada masyarakat pengguna peradilan.

Di tahun 2018, layanan inovasi Pengadilan Agama Negara yang menyentuh layanan masyarakat langsung, seperti adanya fasilitas *free wifi, free charge, gratis air minum, TV media, area merokok* dan layanan pada jam istirahat, hingga akhir tahun 2023 , masih dilaksanakan dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Layanan Mobil Court merupakan layanan unggulan Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan sejak tahun 2019, yang hingga akhir 2023, masih menjadi layanan unggulan Pengadilan Agama Negara,



karena dengan adanya layanan Mobil Court, banyak masyarakat yang sangat terbantu dari kendala-kendala jarak, waktu dan ekonomi untuk menjangkau kantor Pengadilan Agama. Dengan layanan Mobil Court, Pengadilan Agama Negara memberikan kemudahan fasilitas 'jemput bola' dengan layanan mobil bergerak/keliling yang ditempatkan di tempat strategis di pusat perkumpulan masyarakat yang melayani konsultasi, pendaftaran maupun pengambilan produk Pengadilan.

Selain Mobil Court, inovasi Layanan PTSP Online PA. Negara melalui media Whats App yang dimulai sejak tahun 2019, hingga akhir tahun 2023, masih tetap berjalan dan tetap dilaksanakan, yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai perkara tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Negara.

Layanan Double Monitor pada meja kasir yang diimplementasikan sejak tahun 2019, juga masih tetap berjalan hingga akhir tahun 2023, sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Negara dalam menyajikan transparansi keuangan perkara kepada pihak yang berperkara saat berhadapan dengan kasir

Di tahun 2023, dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, Pengadilan Agama Negara tetap memberikan layanan dengan tetap mengikuti aturan atau protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19, dengan ini sesuai dengan SK Ketua PA Negara nomor W15-A11/506/OT.01/4/2021 tanggal 6 April 2021.

Pengadilan Agama Negara juga mengambil langkah inovasi Layanan Booking Produk Pengadilan selama Pandemi, dimana para



pihak berperkara yang ingin mengambil produk Pengadilan, dapat melakukan booking/pesan dulu melalui alat komunikasi telepon maupun media Whats App, sehingga pada hari dan jam yang ditentukan, pihak tersebut dapat langsung mengambil produk yang diinginkannya tanpa harus melalui proses antrian dan menemui kerumunan orang di Pengadilan Agama Negara, sehingga lebih mudah, aman dan nyaman.

Di tahun 2021, Pengadilan Agama Negara juga membuat layanan SILPA (Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan teknis pengantaran langsung produk Pengadilan kepada yang bersangkutan oleh petugas resmi Pengadilan Agama Negara, tanpa biaya pengantaran (*free ongkir*), sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Negara untuk mengambil produknya.

Selain layanan booking produk dan SILPA, di tahun 2022, Pengadilan Agama Negara juga aktif mengingatkan masyarakat agar menerapkan gaya hidup *new normal* dengan selalu memperdengarkan audio himbauan protokol kesehatan pada tempat-tempat layanan.

Adapun layanan inovasi Pengadilan Agama Negara yang sifatnya menyentuh seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara (intern), adalah adanya audio anti gratifikasi, yang membantu pegawai Pengadilan Agama Negara untuk selalu menjaga integritasnya anti korupsi, suap, pungli dan gratifikasi dengan ajakan kepada masyarakat untuk mengawasi langsung perilaku pegawai Pengadilan Agama Negara, dan adanya kegiatan Briepa (briefing pagi), sebagai sarana pemberian



pengarahan dan penyampaian informasi terbaru kepada seluruh pegawai yang dilakukan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai.

Berikut adalah daftar inovasi-inovasi layanan Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2018 hingga tahun 2024.

**Inovasi – Inovasi PA Negara**

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Tanggal Penerapan	Latar Belakang	Hasil/Manfaat Inovasi tersebut
1	Double monitor	Transparansi biaya perkara menampilkan rincian biaya perkara saat pihak melakukan transaksi pada kasir	Jan-19	Antisipasi adanya kecurigaan pihak yang berperkara tentang adanya penyalahgunaan penggunaan biaya perkara	Pihak yang berperkara dapat melihat langsung proses transaksi dan pengeluaran di kasir, sehingga terjadilah transparansi keuangan perkara tersebut, tidak ada lagi kecurigaan akan adanya penyimpangan pengeluaran biaya perkara
2	Rekaman Audio dan himbauan anti gratifikasi	Rekaman Audio yang berisi himbauan agar tidak melakukan tindakan gratifikasi setiap 2 jam sekali sepanjang hari secara otomatis	Jan-19	antisipasi dan selalu mengingatkan pegawai yang lupa komitmen untuk anti gratifikasi dan keikutsertaan masyarakat yang mendukung program anti gratifikasi di PA Negara	sebagai pengingat diri bagi para pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat adanya gratifikasi/penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi pegawai PA Negara



3	Briepa (Briefing Pagi)	kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara setiap hari selama kurang lebih 10 (sepuluh menit) pada jam 08.00 Wita yang berisi pengucapan doa, pengucapan yel-yel semangat pagi, pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh 4 pilar, serta penyampaian program-program yang akan dilakukan pada hari tersebut	Jan-19	antisipasi pegawai yang menyepelkan disiplin, tugas dan tanggung jawabnya,	Pegawai selalu bersemangat setiap hari untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai sarana penyampaian informasi terbaru dan terupdate tanpa harus menunggu pelaksanaan rapat
4	TV Media	Penayangan tentang informasi layanan, kinerja dan kegiatan PA. Negara yang ditayangkan sepanjang hari	Jan-19	tidak ada media untuk menampilkan informasi yang terus update dan mudah dilihat, terutama untuk jadwal dan antrian sidang, layanan informasi pengadilan dan kegiatan pengadilan lainnya, karena banner dan papan pengumuman hanya menampilkan informasi yang tetap dalam jangka lama	Sebagai media informasi yang sangat bermanfaat untuk menampilkan informasi bagi masyarakat yang dapat diupdate setiap hari dan dapat menampilkan banyak informasi



5	Jam Pelayanan Tanpa Istirahat	Pemberian layanan PTSP sepanjang hari kerja tanpa jam istirahat	Jan-19	Masih banyak masyarakat yang datang pada jam istirahat, terutama untuk karyan/pegawai yang hanya dapat berurusan pada jam istirahatnya, dan terpaksa harus menunggu petugas datang setelah jam istirahat untuk dilayani	Masyarakat tetap terlayani dengan tanpa menunggu lama meski pada jam istirahat, terutama para pekerja di tempat lain yang hanya dapat menyempatkan diri berurusan ke kantor pada jam istirahatnya sendiri
6	Media Center	Media Center, pusat informasi, kegiatan diklat virtual dan sarana pengawasan dan pembinaan oleh MA-RI, Badilag dan PTA. Banjarmasin	Sep-19	belum ada ruang khusus untuk PA Negara mengikuti kegiatan virtual, terutama di masa pandemi	Memudahkan konsentrasi dan kondisi tanpa gangguan bagi peserta untuk mengikuti kegiatan virtual yang diselenggarakan pihak internal mahkamah agung RI maupun lembaga lain dengan peralatan yang diperlukan tanpa harus memindah-mindah peralatan untuk komunikasi virtual tersebut
7	Mobil Court	model pelayanan bergerak yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Negara dengan menyediakan layanan informasi/konsultasi, pendaftaran perkara dan penyerahan produk pengadilan serta memberikan pelayanan yang sangat mendasar bagi	Jan-20	jauh dan sulitnya akses masyarakat dari kediaman mereka ke kantor PA Negara	Memberikan kemudahan access to justice bagi masyarakat yang jauh dan sulit untuk menempuh perjalanan ke PA Negara



		tumbuhnya kesadaran hukum melalui model sosialisasi dan edukasi hukum. yang dilaksanakan menggunakan kendaraan roda empat dan dilengkapi dengan fasilitas dan fitur pelayanan dengan waktu dan tempat yang ditetapkan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan ( <i>access to justice</i> ).			
8	SILPA	Sistem Layanan Antar Produk Pengadilan Agama	Jun-20	jauh dan sulitnya akses masyarakat ke PA Negara baik dari segi jarak maupun biaya	mengatasi kesulitan masyarakat yang memerlukan jarak, waktu, biaya dan tenaga untuk pergi ke PA Negara untuk mengambil produknya
9	Free Wifi	Fasilitas pelayanan internet bagi penerima layanan serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi	Mar-18	Masyarakat cenderung bosan ketika sedang menunggu di ruang pelayanan atau ketika menunggu sidang, terutama masyarakat yang ingin mengakses internet tapi tidak mempunyai kuota	Memberikan fasilitas layanan free internet bagi masyarakat di lingkungan PA Negara, menghemat kuota dan biaya masyarakat, dan membuat masyarakat merasa nyaman dan tidak bosan berada di PA Negara



10	Free Charge	Salah satu fasilitas pelayanan untuk memberi kemudahan tambahan daya untuk perangkat elektronik	Mar-18	banyak masyarakat yang sempat kehabisan baterai handphone padahal masih sangat memerlukan handphone tersebut untuk komunikasi, karena kebanyakan masyarakat sudah datang dari jauh dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai di PA Negara	kendala komunikasi masyarakat terutama bagi yang kehabisan baterai handphone dapat teratasi
11	Gratis Air Minum	Menyediakan air mineral untuk penerima layanan	Mar-18	banyak masyarakat yang kehausan ketika sampai atau menunggu antrian di PA Negara	Masyarakat lebih nyaman dan tidak takut haus ketika berada di lingkungan kantor PA Negara
11.	Area Merokok	Menyediakan lokasi untuk perokok yg terpisah dengan pengguna layanan lainnya	Mar-18	terganggunya kenyamanan masyarakat yang sedang berada di ruang tunggu atau di ruang layanan jika ada pengunjung lain yang sedang merokok	menciptakan kenyamanan dan ruang yang sehat bagi pengunjung non perokok, memberikan tempat yang nyaman bagi pengunjung yang merokok
12	Survei Persepsi Korupsi	Survey Korupsi yang dapat diisi masyarakat secara Online	Juni 2022	Pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan survey dan menghindari penggunaan kertas berlebih	Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengisian survey melalui media digital
13	Survei Kepuasan Masyarakat	Survey kepuasan Masyarakat	Juni 2022	Pemanfaatan teknologi untuk	Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengisian survey melalui



		yang dapat diisi masyarakat secara online		pelaksanaan survey dan menghindari penggunaan kertas berlebih	media digital
14	PERSEPSI	Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Persidangan Melalui Sidang Keliling	Januari 2022	Dikarenakan Jarak masyarakat berperkara yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama Negara	Untuk mempermudah masyarakat dalam berperkara mencari keadilan di Pengadilan Agama Negara
15	PASTI MANTAP	Penetapan Inovasi Layanan Penyerahan Produk Salinan Penetapan Pada Hari Yang Sama Setelah Pembacaan Penetapan	April 2022	Dikarenakan masyarakat yang terpencil jauh dari Kabupaten dan kesulitan menempuh jarak ke Kantor Pengadilan Agama Negara	Memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan salinan Penetapan segera setelah pembacaan putusan di persidangan dihari yang sama.
16	AKURAT	Aplikasi Barcode Akta Cerai Terlindungi	April 2022	Banyak terjadi Akta Cerai yang salah dipergunakan karena adanya pemalsuan Akta Cerai	Untuk memberikan kepastian akan keaslian dan keotentikan Akta Cerai yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama Negara
17	INSPIRASI	Inovasi Setelah Perceraian Rubah Akta dan Status Identitas	April 2022	Dimasa Pandemi Covid-19 yang diharuskan untuk jaga jarak bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Untuk Mempermudah dan mempercepat Pelayanan di Pengadilan Agama Negara
18	PALING KOMPPAK	Pelayanan Konseling sebagai Rekomendasi Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak	8 Juni 2022	Banyak terjadi Perkawinan dibawah umur	Untuk mencegah terjadinya perkawinan Dini/ perkawinan dibawah umur
19	SIPADUKA	Sistem Informasi Panduan Berperkara	15 Oktober 2022	Belum ada panduan berperkara khusus bagi	Memudahkan para pihak dalam memperoleh informasi tentang berperkara di Pengadilan



		Bagi Perempuan dan Anak pasca perceraian		perempuan dan anak	Agama Negara khususnya bagi perempuan dan anak
20	Inspirasi Kamis (Inkam)	Kegiatan Keagamaan Rutin setiap hari kamis	17 November 2022	Belum ada kegiatan keagamaan yang rutin setiap minggu	Untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan dengan kegiatan agamis di PA Negara
21	SIAP BISA	Reservasi Antrian Persidangan Bagi Penyandang Disabilitas	2 Mei 2023	Belum adanya pelayanan antrian khusus bagi penyandang disabilitas yang berpekara	Meningkatkan fasilitas dan layanan publik bagi para penyandang disabilitas yang berpekara di PA Negara
22	ETALASE	Reportase kegiatan PA Negara yang ditayangkan di kanal youtube PA Negara setiap bulan	5 Mei 2023	Peningkatan inovasi untuk memberikan gambaran kegiatan yang dilakukan oleh PA Negara	Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PA Negara agar diketahui oleh masyarakat luas
23	SATU GIGA	Sidang Virtual Bagi Warga Binaan	27 Juni 2024	Masih terbatasnya akses persidangan bagi warga binaan	Untuk mempermudah akses dan proses hukum bagi warga binaan yang berpekara di PA Negara
24	JURUSITA IN ACTION (JUSTIN)	Juru Sita atau Juru Sita Pengganti diwajibkan mendokumentasikan kegiatan penyampaian relaas kepada para pihak dalam bentuk foto sebagai bukti pelaksanaan tugas.	24 September 2024	Perlunya sistem yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas	untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam proses penyampaian dokumen pengadilan

### 3. Zona Integritas

Pengadilan Agama Negara sebagai salah satu lembaga pemerintah yang turut mensukseskan upaya Reformasi Birokrasi,



turut andil dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), dan pada tanggal 22 Desember 2020, Pengadilan Agama Negara telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Untuk melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Negara melakukan pembangunan zona integritas tersebut diimplementasikan pada 6 (enam) area, yaitu:

1. Manajemen perubahan
2. Penataan tata laksana
3. Penataan manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan kualitas Pelayanan

Untuk mensukseskan pelaksanaan zona integritas, Pengadilan Agama Negara telah membentuk tim kerja. Tim kerja Pembangunan Zona Integritas yang selalu ditetapkan di awal tahun dan direvisi jika ada perubahan personil.

Pada tahun 2024, Tim Pembangunan Zona Integritas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: 377d/KPA.W15-A11/SK.OT1.1/II/2024, tanggal 6 Februari 2024.



Setelah tim kerja ditetapkan maka disusunlah rencana kerja pembangunan zona integritas yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara nomor Agama Negara Nomor 299a/KPA.W15-A11/SK.OT1.2/I/2024, tanggal 3 Januari 2024.

Rencana pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Negara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Negara dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Negara dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Negara</li> <li>2. Penandatanganan Naskah Ikrar Bersama (Naskah Perjanjian)</li> <li>3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas</li> <li>4. Penandatanganan pakta Integritas seluruh aparat Pengadilan Agama Negara</li> <li>5. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas</li> </ol>
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	Kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara sebagai wilayah pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Negara menjadi wilayah Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Negara</li> <li>2. Penyampaian kebijakan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas</li> <li>3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner, dan radio</li> </ol>
3	Mewujudkan terciptanya	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan aparat yang menjadi Tim</li> </ol>



Komponen Pengukit di Bidang Manajemen Perubahan		Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Pengadilan Agama Negara
	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara 3. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
	Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Negara	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi 3. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut pemantauan dan Evaluasi
	Perubahan Pola Fikir dan Budaya ja	Meningkatkan komitmen, pola pikir dan budaya kerja aparat Pengadilan Agama Negar	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pebangunan Zona Integritas 2. Menunjuk sebagian Hakim dan Pegawai sebagai role model 3. Meningkatkan pelayanan satu atap dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan denga para pihak yang berperkara 4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelanggaran adanya pertemuan aparat Pengadilan



				<p>Agama Negara</p> <p>5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Negara dalam Zona Integritas</p>
4	Mewujudkan terciptanya Komponen pengikut di Bidang Tatalaksana	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis pada Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Menerapkan SOP secara konsisten</p> <p>3. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi</p>
		E-Office	Meningkatkan Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja apartur Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi</p> <p>2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll)</p> <p>3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Negara</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi</p>
		Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Membuat brosur, audio visual, spanduk dan banner dalam</p>



				<p>memberikan informasi kepada publik</p> <p>3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Negara</p>
5	Menwujudkan terciptanya komponen pengikut di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Negara	<p>1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Membuat analisa beban kerja pegawai di Pengadilan Agama Negara</p> <p>3. Memonitoring dan mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Negara</p>
		Pola Mutasi Internal	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM paratur pada Pengadilan Agama Negara	<p>1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Negara</p> <p>3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal</p>
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya Profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Agama Negara	<p>1. Mengusulkan apartur Pengadilan Agama Negara untuk mengikuti Diklat maupun Pengembangan Kompetensi</p> <p>2. Melakukan pengembangan</p>



			<p>upaya kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Negara</p> <p>3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Agama Negara untuk mendapatkan sertifikat dibidang tugas masing-masing</p>
		Penetapan Kinerja Aparatur	<p>Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Agama Negara</p> <p>1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Agama Negara</p> <p>2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerjaindividu level diatasnya</p> <p>3. Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu secara periodik</p> <p>4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu</p>
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	<p>Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Agama Negara</p> <p>1. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS</p> <p>2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar</p> <p>3. Membuat surat ijin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada</p>



				kepentingan yang tidak bisa dihindari
		Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatkan transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Agama Negara	Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP, SIMPEG Pengadilan Agama Negara
6	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang akuntabilitas kinerja	Keterlibatan Pimpian	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan Pimpian secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</li> <li>Melibatkan Pimpian secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja</li> <li>Mamantau pencapaian kinerja secara berkala</li> </ol>
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja aparatur pada Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil</li> <li>Membuat indikator kinerja yang SMART</li> <li>Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu yang membuat informasi tentang kinerja</li> <li>Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas</li> <li>Manempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat dibidang pengelolaan akuntabilitas kinerja</li> </ol>
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi</li> <li>Mengimplementasi pengendalian gratifikasi di</li> </ol>



				Pengadilan Agama
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun pengendalian lingkungan di Pengadilan Agama Negara</li> <li>2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Agama Negara</li> <li>3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi</li> <li>4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Agama Negara</li> </ol>
		Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhidnar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Negara</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat</li> </ol>
		Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Agama Negara</li> </ol>



			Pengadilan Agama Negera	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing system di Pengadilan Agama Negera</li> <li>3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system</li> </ol>
		Penanganan benturan kepentingan	Meningkatkan efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Negera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</li> <li>2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan</li> <li>3. Mengimplementasikan penanganan kepentingan</li> <li>4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan kepentingan</li> </ol>
8	Mewujudkan terciptanya komponen pengikut di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik	Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional Pengadilan Agama Negera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negera</li> <li>2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negera</li> <li>3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Agama Negera</li> <li>4. Melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama Negera</li> </ol>
		Budaya Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Agama Negera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan capacity building di Pengadilan Agama Negera</li> <li>2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media</li> <li>3. Memiliki sistem</li> </ol>



				reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
		Penilaian Kepuasan terhadap layanan	Meningkatnya indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Negara	4. Memiliki sarana pelayanan terpadu dan terintegrasi di Pengadilan Agama Negara
9	Menunjukkan indikator hasil di bidang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Negara yang bersih dan bebas KKN	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Negara 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Negara
10	Mewujudkan indikator hasil dibidang peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Agama Negara	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang



Implementasi pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Negara melalui aplikasi PMPZI kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kemudian Pengadilan Agama Negara dinyatakan lolos sebagai satker pada Zona Integritas, kemudian oleh Mahkamah Agung direkomendasikan untuk diusulkan kepada KEMENPAN RB sebagai satker yang diusulkan Zona Integritas untuk meraih predikat WBBM.

Namun, karena Kemenpan RB menerapkan kebijakan membatasi satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM termasuk Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Agama Negara tidak termasuk yang diusulkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai Satuan Kerja untuk meraih Predikat WBBM.

Belum berhasilnya Pengadilan Agama Negara meraih predikat WBBM tahun 2024 ini menjadi pelecut semangat dan tantangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk meningkatkan komitmen dan kinerja, khususnya dalam pelayanan publik, bagi Pengadilan Agama Negara kegagalan hanyalah sebuah kesuksesan yang tertunda, untuk itu Pengadilan Agama Negara tetap optimis bisa melanjutkan pembangunan Zona Integritas secara berkesinambungan untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun tahun mendatang.



## BAB VI

### PENGAWASAN

Pengawasan tertinggi terhadap Penyelenggaraan Peradilan dan Pelaksanaan Tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Semua Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32 ayat ( 1 ) sebagai berikut :  
"Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman " dan Pasal 32 ayat ( 2 ) disebutkan : "  
Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya.".Disebutkan juga dalam Pasal 12A UU No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ayat (1) dinyatakan bahwa "  
Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung "

Sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peradilan di tingkat Pengadilan Agama di bawah atau selain oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 53 ayat (1): "Ketua Pengadilan Tinggi Agama di wilayah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan



Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. “

Ketua Pengadilan Agama juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Juru Sita Pengganti di lingkungannya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: “Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. “

Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial (kesekretariatan) juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara . Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 32 ayat (5) sebagaimana berikut: “Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memtus perkara.” Dan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut: “Pembinaan dan Pengawasan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa perkara.”



Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Internal kepada Aparatur Pengadilan Agama Negara yang bersih dan berwibawa, maka telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Teknis Peradilan, Bidang Administrasi Umum, yaitu meliputi:

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Negara berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidak-efisienan penyelenggaraan peradilan.



d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

### **1. Pengawasan Melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat pada Pengadilan Agama Negara telah dilakukan oleh atasan kepada masing-masing bawahannya, termasuk dari unsur pimpinan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara.

### **2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang**

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus



ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Secara internal, pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai koordinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : 138/KPA.W15-A11/SK.PW1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang penunjukannya sebagai berikut :

1. H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. (Wakil Ketua) sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan dan merangkap sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan
2. Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik dan Administrasi Umum

Dengan adanya mutasi Hakim, maka Surat Keputusan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang tersebut di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: 870/KPA.W15-A11.HK1.2.5/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang penunjukannya sebagai berikut :

1. Khairi Rosyadi, S.H.I. (Wakil Ketua) sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan dan merangkap sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan



2. Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan

Surat keputusan tersebut berlaku hingga akhir Desember 2024 karena tidak ada lagi mutasi Hakim, sehingga jadwal pelaksanaan Hawasbid tetap dilaksanakan secara berkesinambungan meskipun terjadi pergantian personil Hakim Pengawas.

Adapun jadwal pelaksanaan Hawasbid di tahun 2024 telah dibuat di awal tahun dan telah dilaksanakan per triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2024.

Hakim Pengawas Bidang yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai jadwal tersebut, kemudian membuat laporan dan melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai laporan.

Monitoring dan evaluasi internal juga dilakukan oleh tim penilai mandiri zona integritas Pengadilan Agama Negara. Terhadap pelaksanaan zona integritas yang hasilnya dituangkan dalam bentuk nilai hasil evaluasi, yaitu berupa Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Selain pembinaan dan pengawasan langsung oleh Hakim Pengawas Bidang dan tim penilai zona integritas, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) serta pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang secara kontinyu datang ke



daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah.

Pengawasan di Pengadilan Agama Negara juga dilakukan secara tidak langsung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui CCTV online dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai pendukung dalam implementasi pembagunan Zona Integritas, serta penunjang penilaian dalam pengawasan secara langsung pada Lembaga di atasnya oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **B. Evaluasi**

Adanya pembinaan dan pengawasan bidang oleh para hawasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu disampaikan ditindaklanjuti oleh bagiannya masing-masing baik bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan. Temuan yang telah ditindaklanjuti dan dibuat laporan disampaikan kepada koordinator habinwasbid untuk diketahui.

Begitu juga dengan adanya pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, hasil assessment eksternal, maupun dari lainnya yang terkait menjadi suatu temuan untuk Pengadilan Agama Negara maka akan segera mungkin dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut, sebagai langkah penyempurnaan kinerja Pengadilan Agama Negara.



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Berprestasi, Berakhlak, Berprestasi, Berprestasi, Berprestasi*

**BerAKHLAK**

**bangga  
melayani  
bangsa**



Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.



## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program kerja tahun anggaran 2024 sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan anggaran telah terserap secara maksimal.
2. Administrasi Yustisial (Kepaniteraan) dan Administrasi Umum (Kesekretariatan) semakin baik dan tertib, namun perlu ditingkatkan.
3. Penerimaan perkara tahun 2023 sebanyak 280 perkara disbanding dengan tahun 2022 sebanyak 246 perkara, sehingga terjadi peningkatan penerimaan perkara dari tahun sebelumnya, dan semua perkara yang diterima tahun 2023 sudah diputus sebanyak 280 perkara dengan sisa nihil
4. Disiplin dan efektifitas kerja pegawai semakin baik dan mengembirakan walaupun tenaga staf sangat kurang, namun perlu peningkatan, pembinaan dan pengawasan.
5. Kegiatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain di daerah berjalan dengan baik, lancar dan harmonis.
6. Peningkatan kinerja dan sarana pendukung lainnya telah meunjang peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan prestasi Pengadilan Agama Negara.



7. Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Negara dibuktikan tidak hanya dalam tugas pokok dan fungsi serta pelayanan sebagai penyelenggara peradilan namun banyaknya prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun 2024.

## B. REKOMENDASI

Untuk lebih meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Negara, baik secara kualitas maupun kuantitas, diharapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memperjuangkan peningkatan dan kemajuan di segala bidang. Baik peningkatan pada kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (Pegawai), dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung RI ataupun instansi – instansi lain. Selain itu perlu diintensifkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Demikian Laporan Tahunan dan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Negara Tahun 2024 dibuat sebagai bahan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik dan berkualitas.



LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN PA NEGARA



Penghargaan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

1. Peringkat 1 Nilai Rata – Rata Rapor SIPP Kategori V Periode April – Juni 2022



2. Peringkat 1 Nilai Rata – Rata Rapor SIPP Kategori V Periode Juli – September 2022

Penghargaan dari PTA Banjarmasin dalam acara PTA Banjarmasin Award tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peringkat 1 untuk Pelaporan Perkara Bulanan
2. Peringkat 1 untuk Tertib Administrasi BMN
3. Peringkat 2 untuk Kelengkapan Data dan e-Doc SIKEP dan SIMTEPA
4. Peringkat 3 untuk Pengelolaan Anggaran DIPA 04.

Penghargaan dari KPPN Barabai tahun 2024 diantaranya:

1. Kategori kedua terbaik Penyampaian LPJ Bendahara Bulan September 2024 Bendahara Penerimaan (402572)
2. Kategori pertama terbaik Penyampaian LPJ Bendahara Bulan Oktober 2024 Bendahara Penerimaan (402571)
3. Kategori ketiga terbaik Penyampaian LPJ Bendahara Bulan November 2024 Bendahara Penerimaan (402571)
4. Kategori kedua terbaik Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan 402571 Periode Januari s.d. November 2024
5. Kategori ketiga terbaik Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan 402572 Periode Januari s.d. November



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel

BerAKHLAK  
#bangga  
melayani  
bangsa



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Agama Kelas I

BerAKHLAK #bangga  
melayani  
bangsa

*Selamat Atas Diraihnya*  
**PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA**  
**PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**  
DARI KPPN BARABAI

Sebagai :

Satuan kerja **Terbaik Kedua (402571) & Terbaik Ketiga (402572)** pada kategori penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Periode Januari s.d. November TA 2024

#pa.negera.kab.barabai



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel*

BerAKHLAK

#bangga  
#melayani  
#bangsa



### Pengadilan Agama Negara melakukan Briefing Pagi (Bripa)





### Inspirasi Kamis, Kegiatan Rutin Kamis Sore



PA Negara melaksanakan kegiatan rutin kamsi sore yaitu Inspirasi Kamis, sholat berjama'ah dilanjutkan membaca Yasin serta Tausiah



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel!*

**BerAKHLAK**

# bangga melayani bangsa



Memberikan Pelayanan Terbaik,

PA Negara Mobil Court Laksanakan Pelayanan Keliling.





# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel

BerAKHLAK  
#bangga  
melayani  
bangsa



## Pengadilan Agama Negara Lintasi Sungai

Untuk Pelayanan Verifikasi Sidang Keliling ke Masyarakat Tahun 2024





# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Berprestasi, Inovatif, Semangat, Akuntabel

BerAKHLAK  
#bangga  
#melayani  
#bangsa



Pengadilan Agama Negara Penyerahan Produk Pengadilan, Buku Nikah, dan Dokumen Kependudukan. di gedung serba guna Kecamatan Daha Barat. Acara ini dihadiri oleh Bapak Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Hermansyah, M.M., Ketua MUI Kecamatan Daha Barat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSS, Bapak Camat Daha Barat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, serta Kepala Desa se-Kecamatan Daha Barat.





Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang ke-74, Pengadilan Agama Negara menerima bantuan mobil operasional yang diserahkan oleh Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin. Penyerahan bantuan ini berlangsung dalam acara puncak peringatan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin, 2 Desember 2024

